

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN
EKONOMI PADA NEGARA G-20**

(Pembuktian Grease The Wheels Hypothesis)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

PAMBAGE PAKSI WIENNATA

NIM. C2B007044

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Pambage Paksi Wiennata

Nomor Induk Mahasiswa : C2B007044

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Ilmu Ekonomi dan
Studi Pembangunan

Judul Sripsi : FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN
EKONOMI PADA NEGARA G-20
(Pembuktian *Grease The Wheels
Hypothesis*)

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Purbayu Budi Santosa, MS

Semarang, 1 Juli 2014

Dosen Pembimbing,

(Prof. Dr. H. Purbayu Budi Santosa, MS)

NIP. 19580927 198603 1019

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Pambage Paksi Wiennata

Nomor Induk Mahasiswa : C2B007044

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Ilmu Ekonomi dan
Studi Pembangunan

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN
EKONOMI PADA NEGARA G-20
(Pembuktian *Grease The Wheels
Hypothesis*)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal

Tim Penguji

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Pambage Paksi Wiennata, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI PADA NEGARA G-20 (Pembuktian *Grease The Wheels Hypothesis*)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut dia atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 1 Juli 2014

Yang membuat pernyataan

(Pambage Paksi Wiennata)

NIM : C2B 007 044

Demi Masa...

*Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam
kerugian,*

Kecuali orang-orang yang beriman,

Dan mengerjakan amal saleh,

*Serta nasehat-menasehati supaya mentaati
kebenaran,*

*Dan nasehat-menasehati supaya menetapi
kesabaran.*

(QS. Al – ‘Ashr : 1-3)

Karya ini aku persembahkan
untuk Badan, Pikiran, Perasaan, dan Qolbu-ku

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji “*grease the wheels*” hypothesis. Penelitian ini menyelidiki hubungan antara dampak korupsi, kualitas pemerintah, pajak, investasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan dalam sampel dari G-20 negara selama periode 2001-2010.

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan EViews 6.0. Hasil regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan dari korupsi, pajak dan investasi terhadap pertumbuhan dan terdapat pengaruh negatif yang signifikan dari pengangguran terhadap pertumbuhan. Sementara itu kualitas pemerintah tidak signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan.

Dalam menguji “*grease the wheels*” hypothesis, kualitas pemerintah dibutuhkan dalam prosesnya. Karena dalam pengujian regresi variabel tersebut ditemukan tidak berpengaruh signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa “*grease the wheels*” hypothesis tidak dapat dibuktikan pada negara G-20.

Kata Kunci : “*grease the wheels*” hypothesis, grease theory, pertumbuhan, korupsi, kualitas pemerintah, G-20.

ABSTRACT

The purpose of this study was to test the "grease the wheels" hypothesis. This study investigated the relationship between the impact of corruption, the quality of government, taxation, investment and unemployment on growth in a sample of the G-20 countries over the period 2001-2010.

Based on the results of data analysis using EViews 6.0. Regression results indicate that there is a significant positive effect of corruption, taxation and investment on growth and there is a significant negative effect on the growth of unemployment. While the quality of the government is not significant in affecting growth.

In testing the "grease the wheels" hypothesis, the quality of government is needed in the process. Because the variables in the regression testing found no significant effect, it can be concluded that the "grease the wheels" hypothesis can not be proved at the G-20.

Keyword: "grease the wheels" hypothesis, grease theory, growth, corruption, government quality, the G-20.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta seluruh alam dan seisinya atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya serta Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW yang memberikan tuntunan untuk menapaki hidup sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI PADA NEGARA G-20 (Pembuktian *Grease The Wheels Hypothesis*)”**. Yang menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program sarjana (Strata1) di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada :

1. Ibu Winarsih dan Bapak Ir. Bambang Mulyono, SE, Mamih Papihku tercinta dan tersayang yang telah senantiasa sabar mendidik dan membesarkanku dari kecil, serta terima kasih atas pemberiannya yang tak akan bisa ternilai sampai akhir zaman. Kalianlah Legenda Hidupku.
2. Bapak Prof. Sudharto P. Hadi, MES, Ph. D, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.

3. Bapak Prof. Drs. H. Mohammad Nasir, M.Si., Akt., Ph. D., selaku dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
4. Prof. Dr. H. Purbayu Budi Santosa, MS, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, ide, ilmu, pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada penulis dari awal penyusunan skripsi hingga selesai.
5. Ibu Dra Tri Wahyu Rejekiningsih, MSi, selaku dosen wali yang telah memberikan arahan, saran dan masukan kepada penulis selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi
6. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh Staf Tata Usaha dan Perpustakaan yang telah memberikan pelayanan bagi penulis.
8. Bapak Dr. Nugroho SBM, MSP. yang telah memberikan masukan yang bermanfaat selama penulisan.
9. Bapak Drs. H. Edy Yusuf AG, MSc, Ph. D, yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan studi.
10. Vincent Adrian Wiennata dan Audra Alessandra Wiennata, adik-adikku tersayang semoga aku bisa menjadi pembagi yang adil dan bijaksana. Tirulah yang baik dan singkirkan yang buruk dariku.

11. Almarhumah Hj. Eriani, terima kasih untuk segalanya, semoga Oma mendapat tempat terbaik di sisi-Nya. Al-Fatihah.
12. Om Hengki, yang telah menemani mengerjakan skripsi lembur sampai pagi setiap hari.
13. Mas Abra Puspa Ghani Talattov dan Mas Rusli Abdullah selaku kakak sekaligus mentor yang dengan sabar telah memberi banyak dukungan, bantuan serta arahan selama penulisan. Dan Mas Apung Widadi selaku kakak dan teman diskusi dalam memilih dan memberi masukan tema tulisan.
14. *The Big and Fat Boy* Beni Nurwidiatmoko Wahyulaksono yang telah dengan setia selama tujuh tahun menjadi Sahabat penulis, terima kasih untuk bantuan, ide, solusi, dan motivasi baik yang membangun maupun menjatuhkan, juga masalah-masalah baru yang kau berikan, justru menjadi sumber semangat untukku.
15. Teman Kost Penulis Aditya Fajar Perdana, Panji Setiawan, Ichwan Pratama Hardi, dan Fiki Lukianto yang telah mengisi waktu dengan kebersamaan selama saat-saat jenuh penulis dan memberikan semangat serta motivasi.
16. Keluarga Wisma Granada : Mas Sigit, Mas Uqi, Rahmat, Suhael, Faiz, Teguh, Panji, Aris, Abi, Kharisun, Ndon. Terima kasih telah memberikan pengalaman dalam kehangatan satu atap, serta diskusi-diskusi dan motivasi selama masa studi juga saling ingat-mengingat dalam beribadah.

17. Teman-teman IESP reguler angkatan 2007 : Aji, Dody, Syamsul, Agus, Adit, Zaen, Nunug, Hendy, Rifky, Asti, Kurni, Arief, Eno, Widi, Yosh dan teman-teman satu angkatan yang lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terima kasih telah menghadirkan suasana akademis yang membangun. Senang bisa mengenal kalian. Akulah yang terakhir dari kita.
18. Keluarga Besar Departemen Sosial Politik BEM KM UNDIP : Mbak Nimas, Kang Rizky, Kang Arif, Afan, Uly, Izul, Reynaldi, Taufan, Perdana, Riris. Yang telah mengajarkan bagaimana berorganisasi dan mengorganisasikan sesuatu kepada penulis.
19. Teman-teman KKN Desa Samiran Boyolali : Faril, Yuda, Ardoni, Afrizal, Ade, Ifa, Nevi, Yefi. Yang telah bersama-sama belajar berbaur dengan masyarakat dan saling memotivasi untuk lulus.
20. Keluarga di Majelis Talim Ar-Rauf Kagok : wabil khusus Abah Sururi Chamdan selaku Mursyid, Mas Tadlo, Ust. Makmur, Mas Edy, Mas Junaedi, Mas Randiwan, Mas Parwadi, Kang Asep. Terima kasih untuk pelajaran hidup dan panjatan doanya..
21. Kawan-kawan di Komunitas Prides Online : Rakha, Adri, Bayu, Rhino, Mas Alif, Mas Massa, Mas Krisna, Mas Bayu, Lingga, Tommy, Mas Aji, Adit, Kuat. Terima kasih atas obrolan-obrolan ringan yang menghibur dan pengalaman baru dalam membuka wawasan penulis.

22. Setiap orang yang datang dan pergi tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah banyak membantu dalam proses studi dan penulisan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
23. Dan yang terakhir, untuk seorang gadis diluar sana yang sedang menungguku, mungkin aku mengenalmu, mungkin tidak, mungkin kita pernah bertemu, mungkin juga belum. Siapapun dirimu, kan segera kucari dan kujemput. Bersabarlah, tunggu aku. Insya Allah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena keterbatasan waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya pada penulis dalam penulisan skripsi ini maka penulis sangat mengharapkan saran maupun kritik untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan semoga skripsi ini bermanfaat untuk pihak yang membutuhkan.

Semarang, 1 Juli 2014

Penulis

Pambage Paksi Wiennata

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	25
1.3. Tujuan dan Kegunaan	27
1.4. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	30
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	30
2.1.2. Korupsi	43
2.1.3. <i>Worldwide Governance Indicators</i>	48
2.1.4. Pajak	52
2.1.5. Investasi Asing	58
2.1.6. Pengangguran	62
2.1.7. <i>Grease Theory</i> dan <i>Sand Theory</i>	68
2.2 Penelitian Terdahulu	71
2.4 Kerangka Teoritis	75

2.5 Hipotesis	77
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Batasan Masalah	80
3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	81
3.3. Jenis Data	87
3.4. Pengumpulan Data	88
3.5. Sumber Data	88
3.6. Analisis Data	89
3.6.1. Alat Analisis	89
3.6.2. Pengujian Statistik (<i>First Order Test</i>)	91
3.6.2.1. Pengujian Koefisien Determinan (R^2)	91
3.6.2.2. Pengujian Koefisien Regresi (Uji t)	91
3.6.2.3. Pengujian Koefisien Regresi (Uji F)	92
3.6.3. Uji Asumsi Klasik (<i>Second Order Test</i>)	93
3.6.3.1. Uji Multikolonieritas	93
3.6.3.2. Uji Heteroskedastisitas	94
3.6.3.3. Uji Autokorelasi	94
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	99
4.1. Gambaran Umum Objek penelitian	99
4.1.1. Kelompok Negara G-20	99
4.1.2. Sejarah G-20	100
4.1.3. Konferensi Tingkat Tinggi	101
4.1.4. Organisasi dan Anggota G-20	103
4.1.5. Analisis Isu G-20	106
4.2. Analisis Olah Data Variabel	112
4.2.1. Langkah Pertama : Pemilihan Model Panel	112
4.2.1.1. <i>Fixed vs Common</i>	112
4.2.1.2. <i>Fixed vs Random Effect (Hausman Test)</i>	112
4.2.2. Langkah Kedua : Uji Normalitas	113
4.2.3. Langkah Ketiga : Uji Asumsi Klasik	113
4.2.3.1. Output Estimasi Awal	113

4.2.3.2. Deteksi Autokorelasi	115
4.2.3.3. Deteksi Multikolonieritas	115
4.2.3.4. Deteksi Heteroskedastisitas	117
4.2.4. Langkah Keempat : Analisis Regresi	119
4.2.4.1. R^2	119
4.2.4.2. Uji F	120
4.2.4.3. Uji t	120
4.3. Interpretasi dan Pembahasan	121
BAB V PENUTUP	127
5.1. Kesimpulan	127
5.2. Keterbatasan	128
5.3. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN	134

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1	<i>World Development Indicators (GDP)</i> 11
Grafik 1.2	<i>Corruption Perception Index</i> 14
Grafik 1.3	<i>Worldwide Governance Indicators</i> 16
Grafik 1.4	<i>World Development Indicators (TAX)</i> 19
Grafik 1.5	<i>World Development Indicators (INV)</i> 21
Grafik 1.6	<i>World Development Indicators (UEM)</i> 23
Grafik 4.1	<i>Benchmark atas G-20</i> 109
Grafik 4.2	<i>Benchmark bawah G-20</i> 110

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1	KTT G-20 102
Tabel 4.2	Pembagian kelompok dalam G-20 104
Tabel 4.3	Negara Anggota G-20 105
Tabel 4.4	Output Awal 114
Tabel 4.5	Nilai R-squared dari <i>Metode Klein's Rule of Thumb</i> 116
Tabel 4.6	Nilai R-squared setelah diderivasikan 117
Tabel 4.7	<i>Sum Square Residual</i> 118
Tabel 4.8	Output Akhir 119

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	76
Gambar 3.1 <i>Durbin – Watson</i>	98
Gambar 4.1 Uji <i>Durbin – Watson</i>	115

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A <i>Fixed vs Common</i>	134
Lampiran B <i>Fixed vs Random</i>	135
Lampiran C Uji Normalitas	136
Lampiran D Output Awal	137
Lampiran E Output GLS	138
Lampiran F Data Penelitian	140

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jurnal yang berjudul "*What is the Problem About Corruption?*" (Colin Leys, 1965) membahas mengenai relevansi pendiskusan korupsi. Dalam jurnalnya Leys berpendapat, bahwa korupsi memiliki peranan dalam menciptakan *benefit* dan dalam kondisi masyarakat yang akut tingkat korupsinya, korupsi lebih dari sekedar pencarian keuntungan yang bersifat individual tetapi sudah merupakan perilaku umum.

Terdapat beberapa latar belakang yang memungkinkan maraknya kembali diskusi tentang korupsi dalam beberapa tahun terakhir dan dikaitkan dengan semakin meningkatnya intensitas korupsi, yaitu (Tanzi, 1998):

1. Akhir dari era perang dingin antara “ Barat dan Timur” memaksa para politisi menghentikan sikap hipokritnya terhadap keputusan yang harus diterapkan di negara-negara industri yang memiliki kecenderungan mengabaikan eksistensi *political corruption*.
2. Semakin banyak negara yang beralih ke sistem pemerintahan yang lebih demokratis, berdampak pada informasi menjadi semakin terbuka, dan membuka peluang bagi masyarakat luas untuk mendiskusikan persoalan korupsi yang sebelumnya dianggap sebagai topik yang tabu untuk dibicarakan.

3. Globalisasi memungkinkan setiap elemen negara untuk lebih aktif bergabung dalam gerakan internasional, dan kondisi ini merupakan iklim sejuk bagi tumbuhnya lembaga swadaya masyarakat (*Non-Governmental Organization*) yang difungsikan sebagai *watchdog*, terutama bagi pemerintah.
4. Semakin ketatnya persaingan dalam bidang ekonomi membuat isu efisiensi menjadi sangat penting. Sehingga setiap negara, termasuk badan dunia yang terkait dalam bidang pembangunan, merasa perlu untuk menyingkirkan segala macam kegiatan yang dapat mendistorsi perekonomian menuju efisiensi, dan korupsi menjadi sasaran utama.
5. Tidak dapat dipungkiri peran yang dimainkan Amerika Serikat memiliki pengaruh yang besar dalam menguak korupsi internasional. Menurut undang-undang Amerika Serikat, korupsi adalah tindakan kriminal, sehingga warga negara Amerika Serikat, di manapun usaha yang dijalankannya, tidak terbebas dari ketentuan tersebut. Dalam sambutannya dihadapan *Detroit Economic Club* (25 Juli 1996), Michael Kantor, *Secretary of Commerce*, mengatakan bahwa pengusaha Amerika Serikat sejak 1994 mengalami kehilangan kontrak internasional sebesar US\$ 45 milyar sebagai akibat keharusan membayar “upeti” kepada aparat pemerintah setempat, yang dalam undang-undang di Amerika Serikat tidak dapat dimasukkan dalam unsur *business cost*.

Merupakan upaya yang sangat sulit untuk dapat membuat sebuah definisi yang dapat memberikan pemahaman secara tepat tentang korupsi. Terdapat

banyak perbedaan antara bentuk korupsi di negara maju dengan negara sedang berkembang, antara bentuk korupsi yang berada dalam tekanan politik atau korupsi yang memperlambat proses pertumbuhan ekonomi, dan dalam bentuk yang lebih 'ramah' lagi adalah korupsi yang muncul karena alasan-alasan ekonomi dan politis yang dilakukan oleh negara (Bardhan, 1997; Tanzi, 1998; Khan, 1998).

Namun demikian, dari sekian banyak definisi korupsi dari berbagai sudut pandang, terdapat beberapa definisi yang sering digunakan oleh para peneliti, yaitu antara lain:

1. *"..government corruption as the sale by government officials of government property for personal gain."* (Shleifer and Vishny, 1993).
2. *"...as the violation of the formal rules governing the allocation of public resources by officials in response to offer of financial gain or political support "* (Khan, 1998).
3. Dan yang paling sering dijadikan acuan adalah definisi tentang korupsi yang dibuat oleh *World Bank* *"..the abuse of entrusted power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance"*.

Sementara itu, terdapat beberapa peneliti misalnya Thiele dan Eskeland (1999) yang menggunakan acuan *World Bank*, seringkali menggunakan istilah *"corruption"* dengan *"Collusion"* secara bergantian, dengan pertimbangan bahwa istilah *"corruption"* cenderung terkait dengan *"abuse of public office"*, sedangkan penggunaan istilah *"collusion"* lebih bersifat fleksibel karena dapat diterapkan pada perilaku penyalahgunaan wewenang oleh pihak swasta atau memanfaatkan sikap korup para aparat pemerintah.

Berdasarkan definisi tersebut, korupsi akan terjadi apabila memiliki empat unsur: (a) *public official*, (b) *discretionary power*, (c) *a misuse of that power by public official*, dan (d) *benefit resulting to that official* (Langseth, Stapenhurst, and Pope, 1997).

Mitos bahwa korupsi merupakan "*intrinsic nature*" sehingga tidak mungkin diukur, menyebabkan persoalan korupsi menjadi semakin rumit. Seperti yang diungkapkan oleh Daniel Kaufmann dalam Wammey (1999), karena anggapan seperti itu Afrika menjadi benua yang tidak memiliki harapan untuk terbebas dari tindak korupsi (menurut James Wolfenson, Presiden Bank Dunia, pada tahun 1998 di Afrika *total foreign private capital flows* sebesar US\$ 300 milyar, namun yang berbentuk *direct investment* hanya US\$ 2,6 milyar).

Rumitnya persoalan korupsi juga ditunjang dengan ketiadaan data empiris yang jelas sehingga memberikan peluang bagi para politisi korup untuk menutupi tindakannya dengan alasan politis.

Sampai saat ini banyak versi yang mengukur korupsi dari berbagai sudut pandang. Beberapa ukuran yang sering digunakan dalam hubungan antara korupsi dengan ekonomi menurut Shang-Jin Wei (1999) dalam *Work Paper Development Research Group* yang diterbitkan oleh *World Bank* yaitu :

1. *Business International Index*.

Indeks ini didasarkan atas survei terhadap konsultan atau para ahli (biasanya satu konsultan untuk satu negara) yang disusun selama kurun waktu 1980 - 1983 oleh *Business International*, yang saat ini berubah menjadi *Economist Intelligence Unit*. BI menyusun negara-negara yang

menjadi obyek pengamatan dalam sepuluh kategori berdasarkan tingkat keterlibatan transaksi bisnis dalam korupsi atau pembayaran-pembayaran yang dipertanyakan.

2. *International Country Risk Guide Index*. Laporan tersebut dibuat setiap tahun sejak 1982 oleh *Political Risk Service*, yaitu suatu jasa yang diarahkan untuk melayani informasi tentang risiko suatu negara bagi *private international investment*. ICRG indeks didasarkan atas opini ahli untuk menangkap secara luas "*high government officials are likely to demand special payment*" dan "*illegal payments are generally expected throughout lower levels of government*" dalam bentuk penyuapan yang terkait dengan lisensi ekspor atau impor, *tax assessments*, perlindungan polisi maupun pinjaman.
3. *Global Competitiveness Report Index*. Indeks ini didasarkan atas survei yang dilakukan oleh manager perusahaan, yang disponsori oleh *World Economic Forum*, konsorsium perusahaan-perusahaan Eropa, dan didisain oleh *Harvard Institute for International Development*. Survei tersebut membahas respon perusahaan tentang berbagai aspek persaingan yang ada di negara tempat perusahaan tersebut menginvestasikan dananya. Perusahaan yang terlibat dalam survei ini sebanyak 2381 perusahaan yang terletak di 58 negara menjawab pertanyaan seputar tingkat korupsi yang dirangking dalam tujuh skala dengan penekanan pada aspek tingkat ketidak teraturan tindak korupsi, tambahan-tambahan biaya dalam

perijinan ekspor-impor, lisensi bisnis, *exchange controls*, *tax assessments*, kepolisian, dan aplikasi pinjaman.

4. *Transparency International Index* atau yang lebih sering dikenal dengan *Corruption Perception Index*, Dibuat secara berkala tahunan sejak 1995 oleh *Transparency International*, yaitu suatu lembaga sosial non pemerintah yang memerangi korupsi secara internasional. Indeks ini didasarkan atas rata-rata tertimbang dari sepuluh model survey yang dilakukannya dengan membuat skala negara-negara korup menjadi tujuh skala. Sebagai sebuah survei, survei yang dilakukan oleh TI memiliki kekuatan dan kelemahan. Jika pengukuran kesalahan (error) disurvei yang berbeda adalah kesalahan yang bersifat independen dan terdistribusi secara jelas (*Independent and Identically Distributed*, atau IID), maka proses perhitungan yang digunakan TI mungkin akan mengurangi kesalahan pengukuran, tetapi apabila syarat IID dilanggar maka akan memperbesar kesalahan pengukuran (Wei, 1999).

Penanggulangan korupsi bersifat kompleks dan memerlukan keterpaduan.

Upaya penanggulangan terhadap korupsi dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu (Pope, 2008) : kepemimpinan, program publik, perbaikan organisasi pemerintah, penegakan hukum, kesadaran masyarakat dan pembentukan lembaga pencegah korupsi.

Menurut penulis, apa yang dikemukakan oleh Jeremy Pope tersebut masih terlalu luas dan sulit dilaksanakan. Terutama untuk kasus pemberantasan korupsi

di skala global menurut hemat penulis harus dilakukan melalui dua cara, yaitu upaya pencegahan dan penindakan.

Upaya pencegahan atau preventif harus dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan. Upaya yang bersifat preventif adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama para penyelenggara negara (birokrasi) melalui pendidikan (penataran, penyuluhan, seminar, lokakarya, dsb) agar dapat berperilaku anti korupsi dan malu melakukan korupsi dan kedua adalah melakukan pengawasan yang lebih tersistematis dengan menerapkan teknologi canggih seperti yang diterapkan di negara-negara maju.

Sedangkan upaya penindakan dilakukan melalui penegakan hukum yakni dengan memberikan hukuman yang pantas dan dapat membuat pelakunya jera, serta dapat menjadikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak terjerumus ke dalam prektek korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi skala global dalam jangka panjang membutuhkan dukungan dari masyarakat yang berada pada tiap negaranya secara langsung. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Jeremy Pope (2008), ia berpendapat bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan dukungan masyarakat secara luas dan tanpa dukungan masyarakat secara luas niscaya akan mengalami kegagalan.

Berbagai teori dan definisi tentang korupsi yang ada, hampir keseluruhan mendukung pendapat bahwa korupsi memang memberikan dampak yang negatif, seperti yang diungkapkan Mo (2001) bahwa kenaikan tingkat korupsi dapat mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi, menurut penelitian Gazdar (2011)

terdapat beberapa kalangan yang berpendapat sebaliknya dan menjadikannya sebuah prinsip.

Salah satu prinsip yang dianut oleh mereka saat ini adalah “*grease the wheel*”. Korupsi dipandang oleh para “*corruption apologist*” sebagai minyak pelumas sistem ekonomi yang tidak berjalan secara efisien akibat tidak berfungsinya birokrasi dikombinasikan dengan peraturan pemerintah yang timpang tindih. Dalam kondisi ini, suap dipandang sebagai insentif bagi pegawai publik untuk melayani klien dengan sebaik-baiknya. Hipotesis ini menyebutkan bahwa korupsi justru akan memberikan dampak yang positif pada pertumbuhan ekonomi suatu negara ketika lembaga institusi negara tersebut tidak berjalan dengan baik (Gazdar, 2011).

Sebagian masyarakat telah menganggap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan korupsi sebagai kegiatan yang wajar dan biasa, mereka bahkan melakukannya secara berulang-ulang tanpa ada rasa bersalah. ambil contoh kecil seperti penggunaan jasa calo dan menggunakan hal yang biasa disebut dengan “uang pelicin” untuk membantu mempercepat pencapaian tujuan mereka.

Dengan melihat keadaan mengenai cara pandang terhadap korupsi tersebut, maka dapat disimpulkan secara garis besar bahwa korupsi berdampak negatif pada tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara seperti yang dijelaskan oleh beberapa peneliti seperti Mo (2001) dan Podobnik (2008), dan disisi lain apabila keadaan lembaga pemerintah di negara tersebut lemah maka *Grease*

Theory terjadi, yang menyebabkan korupsi justru meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti yang dikatakan Gazdar (2011).

Berdasarkan dua pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi memberikan pengaruh secara langsung terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi baik itu positif maupun negatif. Apabila membahas mengenai pertumbuhan ekonomi, terdapat sebuah kelompok negara yang didominasi oleh negara-negara yang sebagian besar memiliki keadaan ekonomi yang stabil. Hal tersebut tidak hanya ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan saja, melainkan variabel lain seperti penerimaan pajak, investasi asing, dan tingkat pengangguran yang tren nya relatif baik. Kelompok negara tersebut adalah G-20.

G-20 atau Kelompok 20 ekonomi utama adalah kelompok 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Secara resmi G-20 dinamakan *The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors* atau Kelompok Dua puluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral.

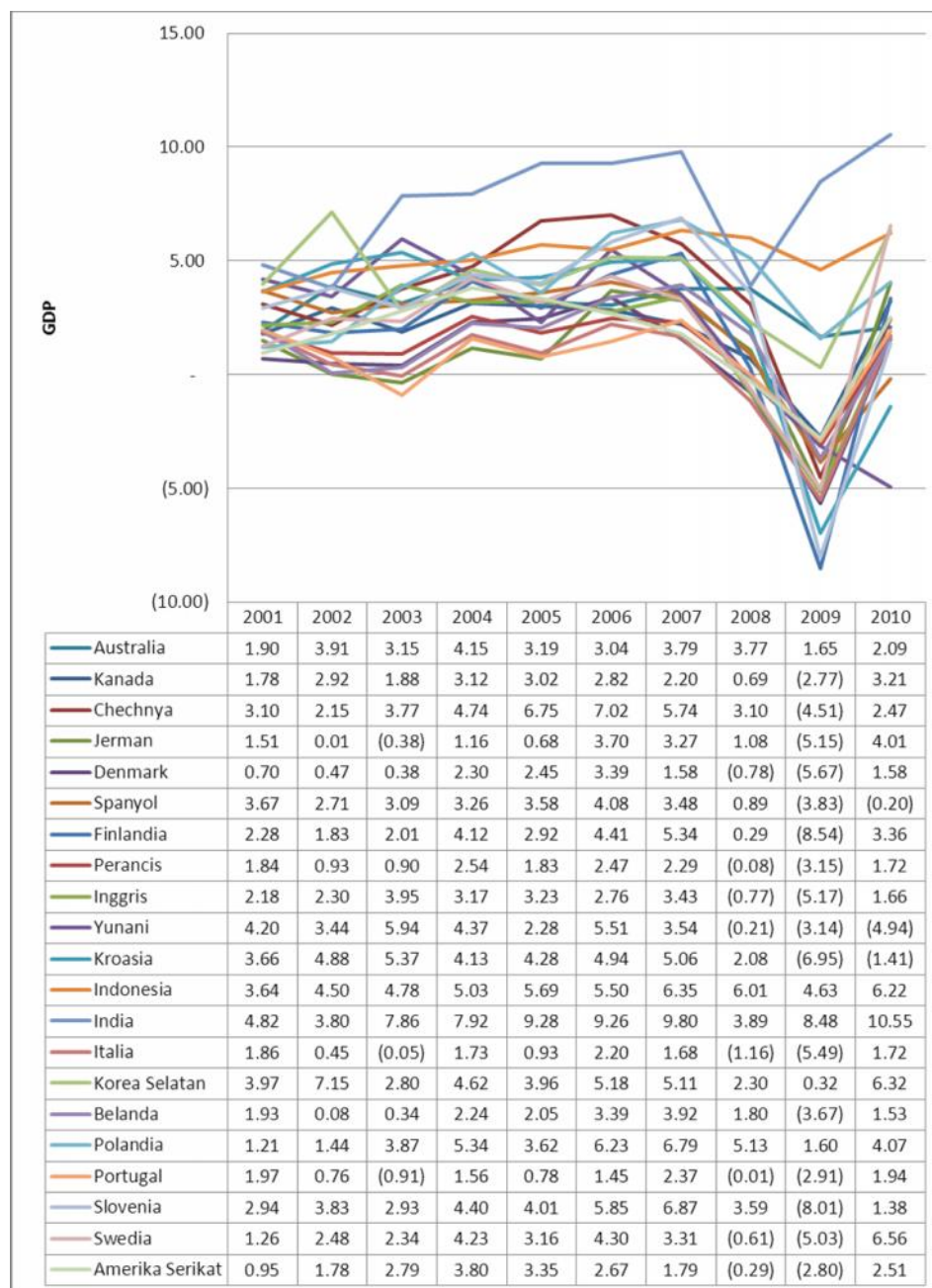
Kelompok ini dibentuk tahun 1999 sebagai forum yang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia. Pertemuan perdana G-20 berlangsung di Berlin, 15-16 Desember 1999 dengan tuan rumah menteri keuangan Jerman dan Kanada (www.g20.org diakses pada tanggal 29 Maret 2014)

Boleh dikatakan bahwa G-20 memiliki mayoritas anggota dengan keadaan ekonomi yang kuat dan stabil. Didukung juga oleh tingkat korupsi yang rendah,

kualitas lembaga pemerintah yang baik, penerimaan pajak yang tinggi, investasi asing yang tinggi dan jumlah pengangguran yang relatif rendah.

Hal tersebut dapat dilihat pada Grafik 1.1 sampai 1.6. Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa sudah tidak dipungkiri lagi memiliki keadaan negara yang stabil, tetapi di dalam G-20 sendiri masih ada negara-negara yang belum mapan secara ekonomi dan dapat dibilang masih merintis kekuatan ekonomi negaranya, negara-negara seperti Indonesia dan India merupakan sebuah contoh dan bukti bahwa dalam G-20 tidak selalu didominasi oleh raksasa ekonomi dunia.

Grafik 1.1
World Development Indicators (GDP)



Sumber : *World Bank*, 2001-2010

Grafik 1.1 merupakan data *World Development Indicators* mengenai GDP yang bersumber dari *World Bank*. Dalam penelitian ini GDP digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan ekonomi. GDP digunakan untuk mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. GDP juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat (McEachern, 2000).

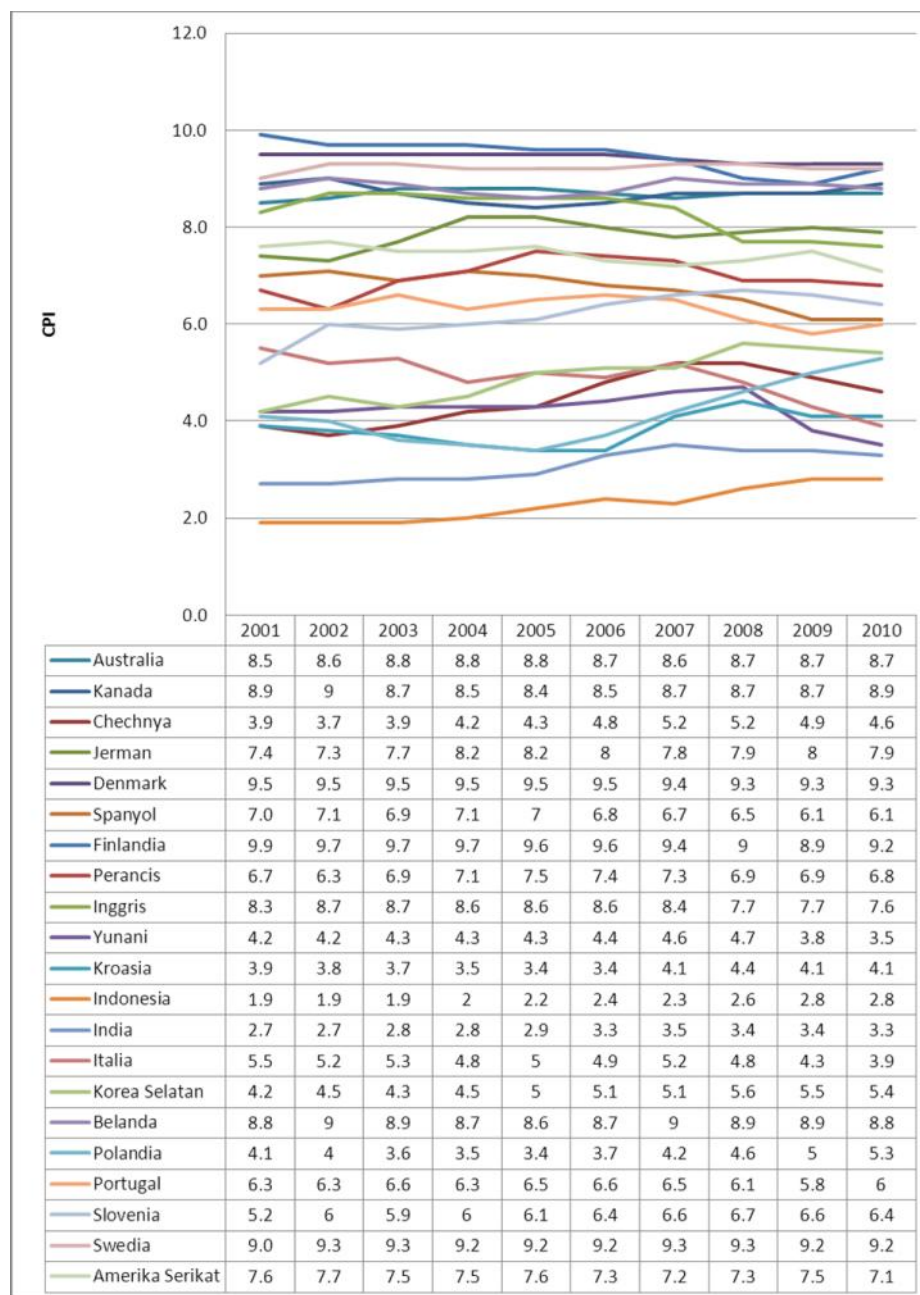
Berdasarkan Grafik 1.1 dapat diketahui bahwa Indonesia dan India memiliki tingkat pertumbuhan diatas negara maju lainnya seperti Amerika Serikat dan Inggris. Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik selama 10 tahun terakhir, dengan tingkat pertumbuhan diatas 2,5% dalam 10 tahun, pertumbuhan ekonomi Indonesia meninggalkan negara-negara G-20 lainnya yang hanya naik kurang dari 2,5% selama 10 tahun terakhir kecuali Swedia dan Polandia, sedangkan untuk India tingkat pertumbuhannya jauh diatas Indonesia. India mengalami pertumbuhan lebih dari 5% selama 10 tahun terakhir, hal ini menjadikan India sebagai negara yang paling baik pertumbuhan ekonominya diantara negara G-20 lainnya.

Pada tahun 2008 terjadi krisis ekonomi global yang dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh dunia. Pada September 2008, kondisi perekonomian dunia mengalami inflasi yang disebabkan karena pemerintah Amerika Serikat tidak memberikan *bailout* kepada *Lehmann Brother*, tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa lolos dari imbas keuangan di Amerika Serikat, “Sehingga dunia menghadapi guncangan sangat besar” seperti yang diungkapkan oleh Sri Mulyani

sebagai menteri keuangan Indonesia pada saat itu (www.news.detik.com diakses pada tanggal 5 Maret 2014).

Dampak krisis dapat dilihat pada Grafik 1.1 untuk tahun 2008 dan 2009, hampir semua negara mengalami penurunan angka yang tajam bahkan beberapa mengalami dampak *minus* pertumbuhan ekonomi. Sementara Indonesia tidak mengalami dampak yang begitu buruk sementara India dapat segera pulih dengan cepat pada tahun berikutnya.

Grafik 1.2
Corruption Perception Index



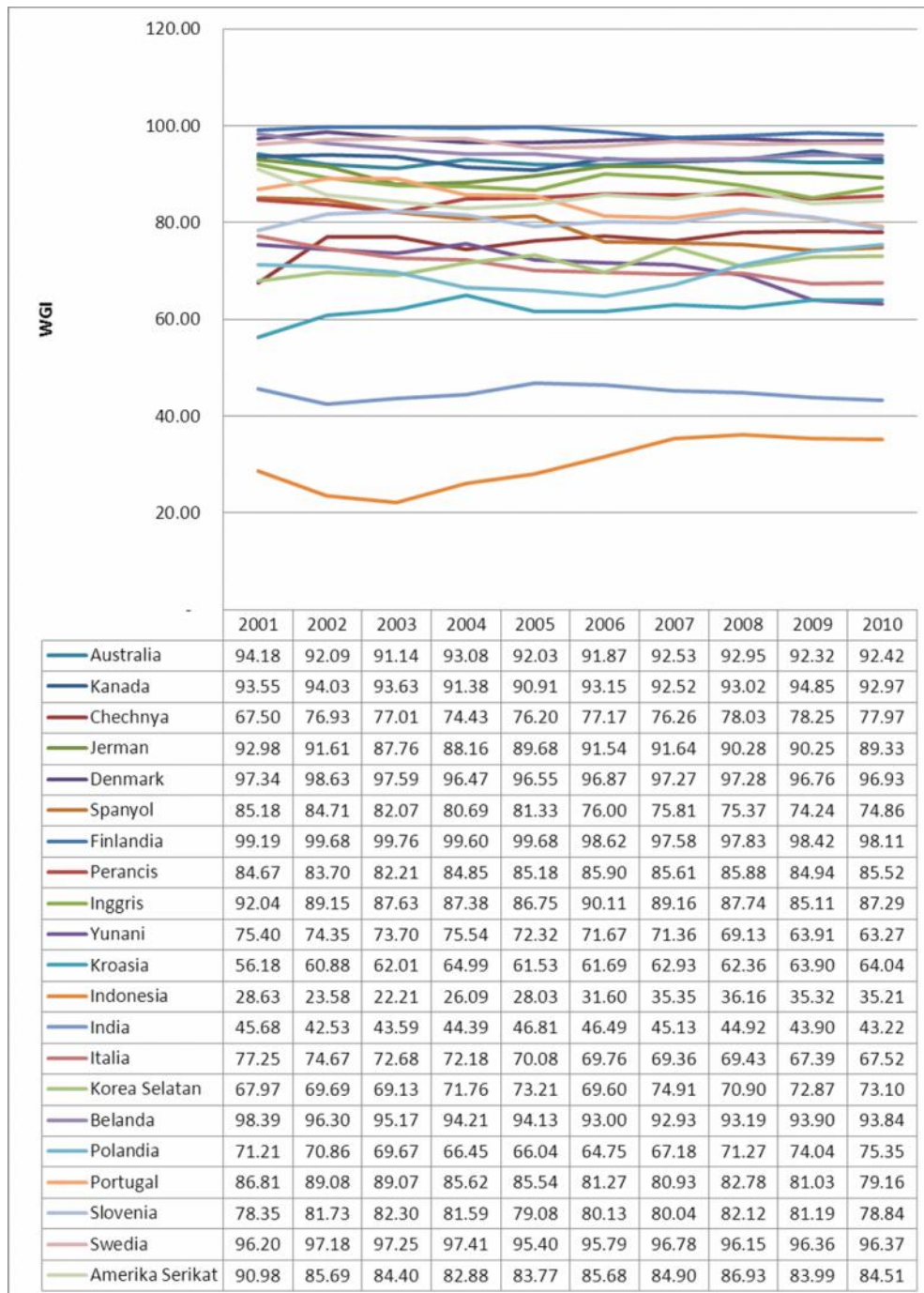
Sumber : *Transparency International 2001-2010*

Grafik 1.2 merupakan data *Corruption Perception Index* yang biasa disebut juga sebagai *Transparency International Index*. Diterbitkan oleh lembaga non-profit *Transparency International*. Dalam penelitian ini CPI digunakan sebagai alat ukur tingkat korupsi. CPI merupakan indeks gabungan yang mengukur persepsi korupsi secara global. CPI juga digunakan untuk membandingkan kondisi korupsi di suatu negara terhadap negara lain.

Berdasarkan Grafik 1.2 dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki tingkat korupsi paling buruk diantara negara G-20 lainnya, disusul India. Skor yang rendah berarti mengindikasikan tingginya tingkat korupsi suatu negara. Indonesia dan India mendapat skor dibawah 5 selama 10 tahun terakhir, yang berarti tidak ada perubahan yang signifikan dalam upaya penegakan hukum bagi para pelaku koruptor (TII, 2010). Dalam G-20 sendiri terdapat negara-negara yang selalu menempati ranking terbaik dalam pembersihan dari tindak korupsi, negara-negara seperti Finlandia, Denmark dan Swedia selalu memiliki diatas 9, hal tersebut mengindikasikan bahwa negara-negara tersebut paling bersih dari tindak korupsi diantara negara G-20 lainnya.

Lemahnya pemberantasan korupsi di Indonesia disebabkan oleh lemahnya pengawasan masyarakat pada tindak pidana tersebut. Secara resmi, masyarakat pun tidak dilibatkan dalam proses pemberantasan korupsi. "Kegagalan pemberantasan ini karena publik tidak dilibatkan dalam proses. Jadi, jangan ulangi kegagalan pemerintahan kegagalan masa lalu," (Bambang Widjojanto dalam diskusi bersama *Indonesia Corruption Watch (ICW)* di Jakarta, Senin 9 Juni 2014).

Grafik 1.3
Worldwide Governance Indicators



Sumber : *World Bank, 2001-2010*

Grafik 1.3 merupakan data *World Governance Indicators* mengenai WGI yang bersumber dari *World Bank*. Dalam penelitian ini WGI digunakan sebagai alat ukur kualitas lembaga pemerintah. WGI merupakan kumpulan indikator di bidang *governance* yang diterbitkan oleh salah satu tim riset *World Bank*, yaitu melalui *Macroeconomics and Growth Team-Development Research Group*, sejak tahun 1996. WGI mengukur enam dimensi *governance*, yakni (1) *Voice and accountability*, (2) *Political stability and absence of violence*, (3) *Government effectiveness*, (4) *Regulatory quality*, (5) *Rule of law*, dan (6) *Control of corruption*, dengan cakupan hingga 200 negara.

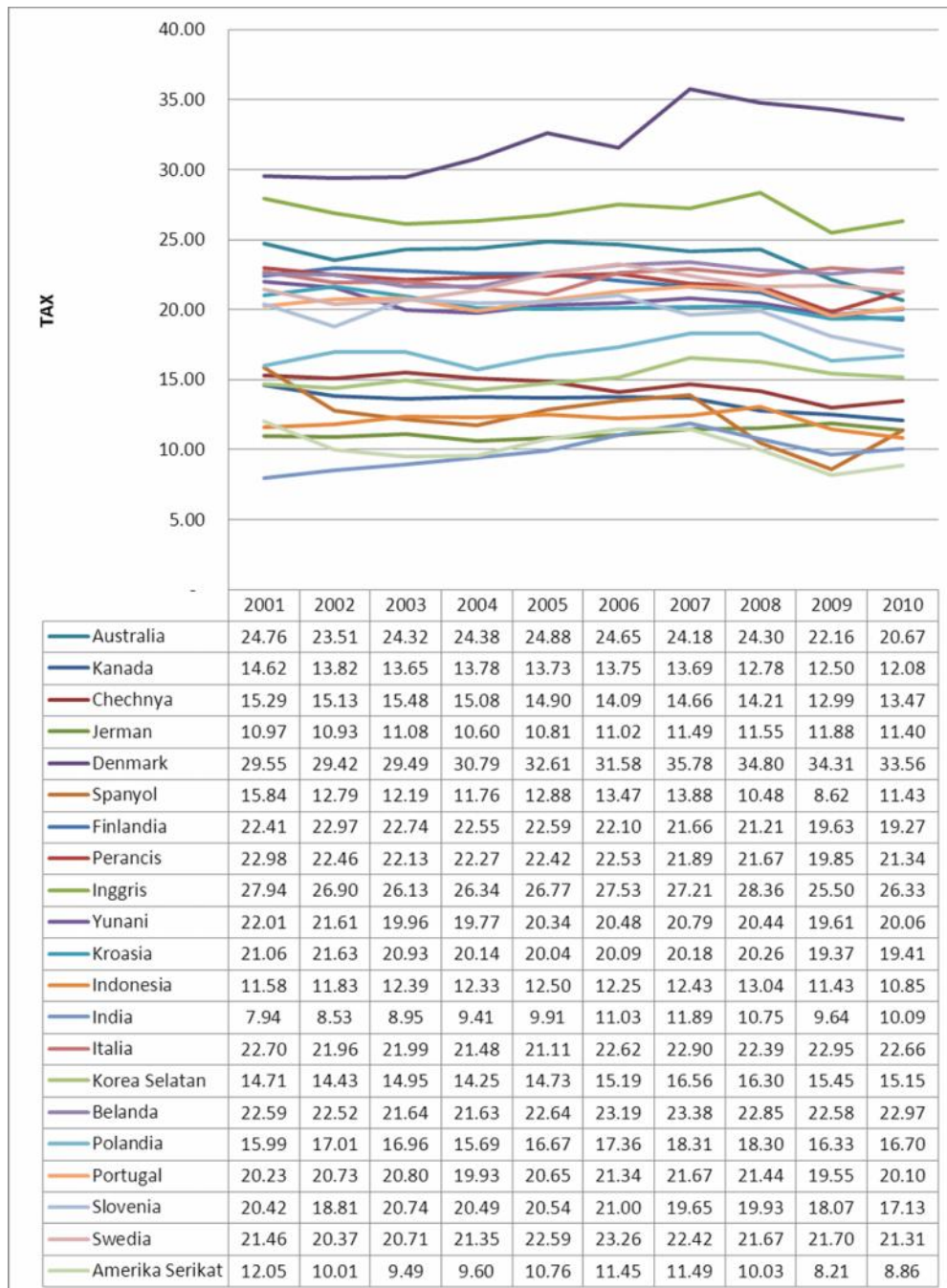
Berdasarkan Grafik 1.3 dapat dilihat Indonesia memiliki kualitas lembaga pemerintah yang rendah, terendah pertama sebelum India. Hal tersebut sama seperti keadaan tindak korupsi yang terjadi di dua negara itu. Kualitas lembaga pemerintah memang lebih rendah dari India, tapi dari data diatas menunjukkan bahwa tren kualitas lembaga pemerintah Indonesia meningkat dalam 10 tahun terakhir, tidak seperti India yang justru mengalami penurunan.

Negara yang memiliki ranking baik untuk tindak korupsi ternyata juga memiliki kualitas lembaga pemerintah yang baik. Negara Finlandia dan Denmark memiliki kualitas lembaga pemerintah dengan rata-rata ranking sebesar 98,11% untuk Finlandia dan 96,93% untuk Denmark, jauh berbeda bila dibandingkan dengan Indonesia yang hanya memiliki ranking sebesar 35,21% dan India 43,22% pada tahun 2010.

Pemerintah Indonesia menanggapi masalah tersebut dengan serius, dalam kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode yang

dimulai semenjak tahun 2004 sampai 2009 untuk periode pertama dan 2009 sampai 2011, Pemerintah Indonesia menjalankan program yang disebut dengan ‘Reformasi Birokrasi’, reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara (www.menpan.go.id diakses pada tanggal 20 Juni 2014). Terbukti tren grafik kualitas lembaga pemerintah mengalami peningkatan semenjak tahun 2004.

Grafik 1.4
World Development Indicators (TAX)

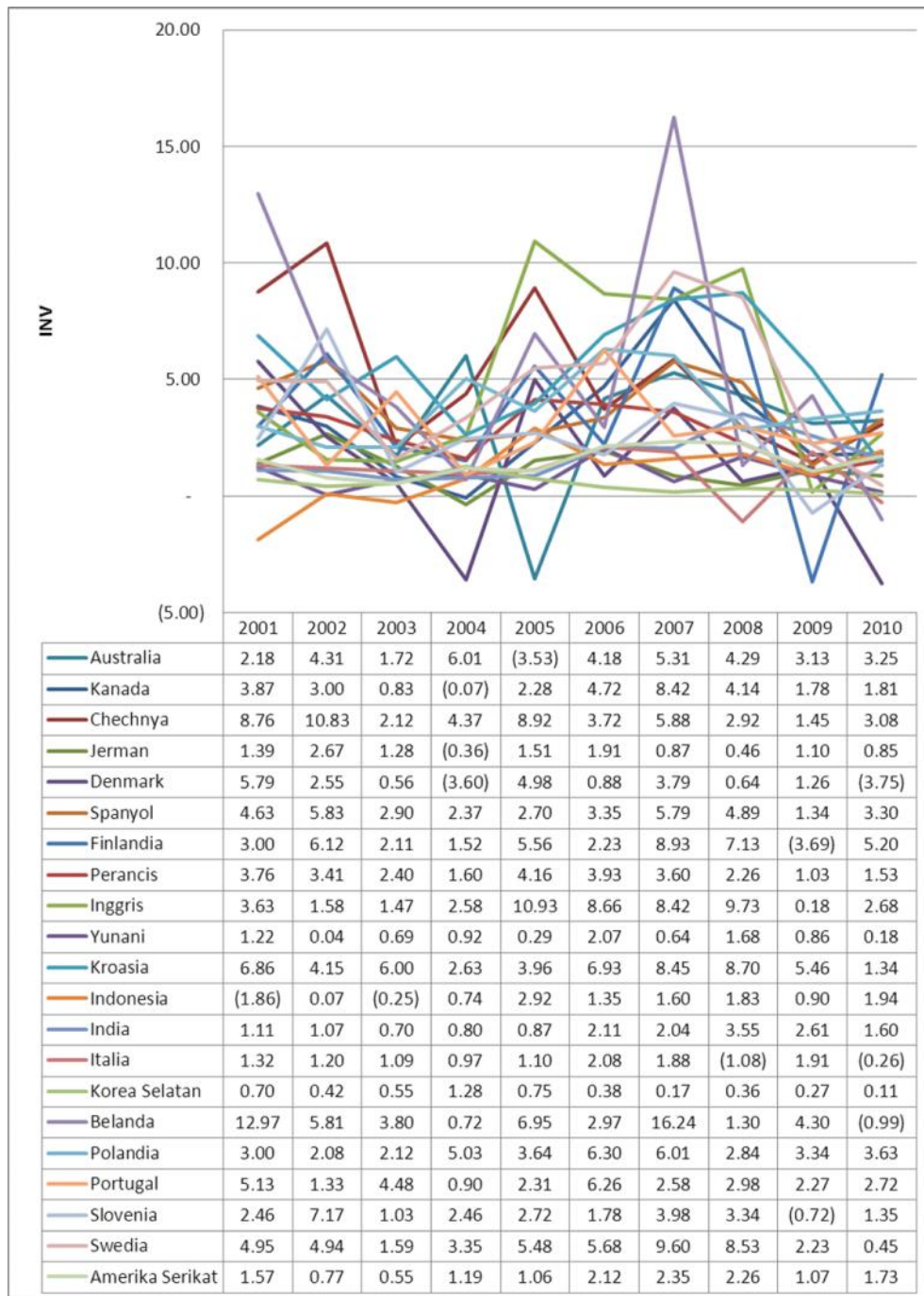


Sumber : *World Bank, 2001-2010*

Grafik 1.4 merupakan data *World Development Indicators* mengenai TAX yang bersumber dari *World Bank*. Dalam penelitian ini TAX digunakan sebagai alat ukur penerimaan pajak. Pajak menurut Soemitro dalam Suharno (2003) adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk public saving yang menurut sumber utama untuk membiayai public investment.

Disamping tingkat korupsi dan kualitas lembaga pemerintahan yang buruk, berdasarkan data dari *World Bank* tahun 2001-2010 terlihat kedua negara tersebut juga masih lemah dibidang penerimaan pajak Grafik 1.4 *World Development Indicators (Tax)* dibandingkan dengan negara anggota G-20 lainnya, Indonesia dan India hanya mendapatkan penerimaan dari pajak sebesar 10,85% dari rasio GDP untuk Indonesia dan 10,09% dari rasio GDP untuk India, jumlah pajak yang diterima tersebut lebih rendah dari negara G-20 lainnya kecuali Amerika Serikat. Amerika Serikat hanya mendapatkan penerimaan dari pajak sebesar 8,86% dari rasio GDP pada tahun 2010, hal ini disebabkan oleh krisis yang terjadi pada negara itu pada tahun 2008 dan dampaknya menjadi sistemik terhadap kondisi ekonomi global.

Grafik 1.5
World Development Indicators (INV)

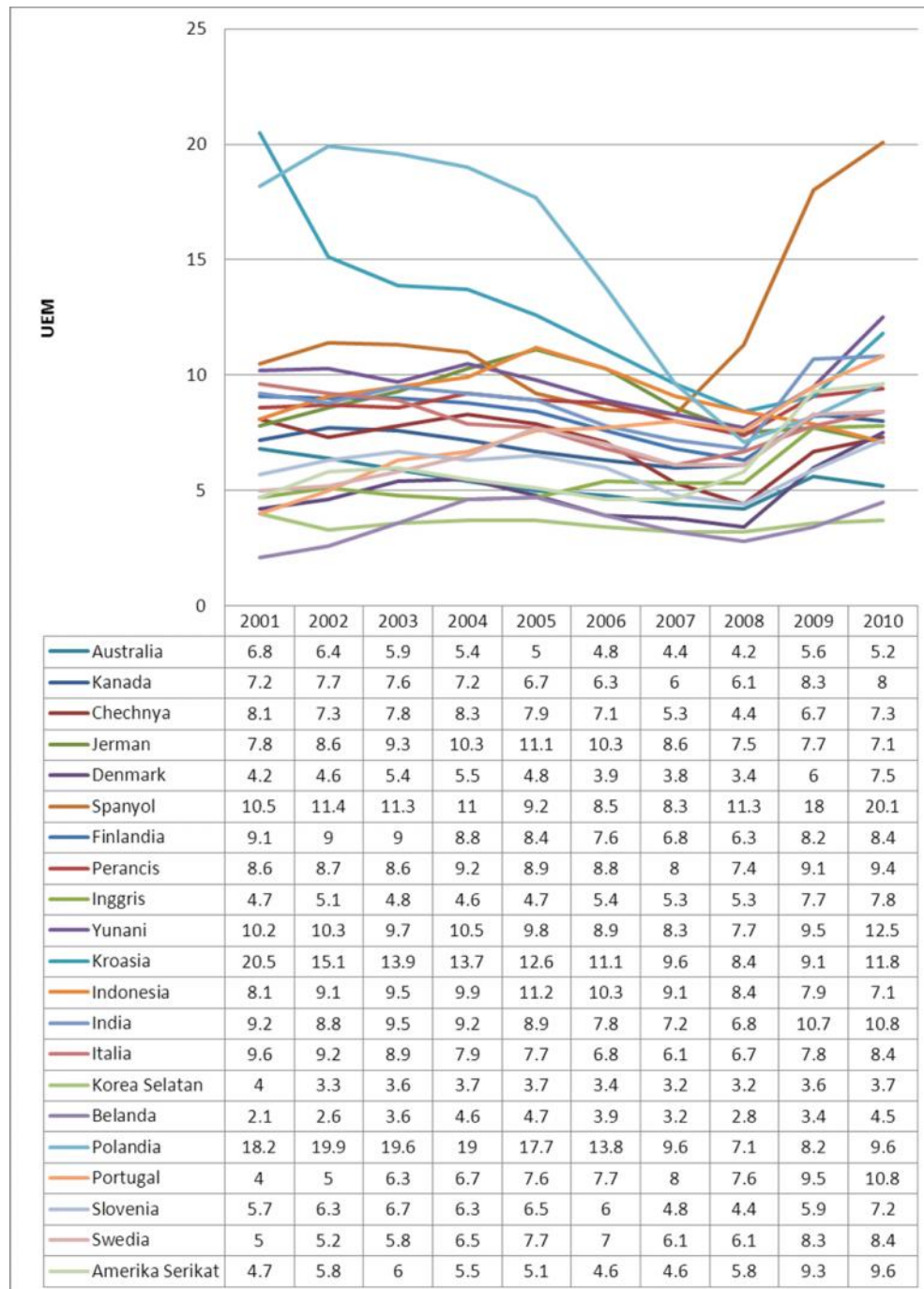


Sumber : World Bank, 2001-2010

Grafik 1.5 merupakan data *World Development Indicators* mengenai INV yang bersumber dari *World Bank*. Dalam penelitian ini INV digunakan sebagai alat ukur investasi asing. Investasi asing merupakan arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri (Krugman, 1994).

Disamping tingkat penerimaan pajak yang rendah berdasarkan data dari *World Bank* tahun 2001-2010 terlihat kedua negara tersebut juga masih lemah dibidang penerimaan investasi asing Grafik 1.5 *World Development Indicators (Inv)* dibandingkan dengan negara anggota G-20 lainnya, jumlah investasi asing yang masuk juga terbilang rendah untuk kedua negara itu, dengan 1,94% dari rasio GDP untuk Indonesia dan 1,60% dari rasio GDP untuk India, jumlah tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan Finlandia yang menerima investasi asing sebesar 5,20% dari rasio GDP nya untuk tahun 2010. Sementara Denmark hanya menerima -3,75% dari rasio GDP pada tahun yang sama, hal ini disebabkan oleh dampak krisis yang dialami Amerika Serikat 2008 dan berdampak global, hampir keseluruhan dari sektor yang berhubungan dengan ekonomi mengalami penurunan, tidak terkecuali jumlah investasi asing yang masuk. Masing-masing negara dalam G-20 memiliki ketahanan dan kemampuan pulih yang berbeda dari dampak krisis tersebut. Denmark dalam hal ini mengalami dampak paling parah pada sektor investasinya.

Grafik 1.6
World Development Indicators (UEM)



Sumber : *World Bank, 2001-2010*

Grafik 1.6 merupakan data *World Development Indicators* mengenai UEM yang bersumber dari *World Bank*. Dalam penelitian ini UEM digunakan sebagai alat ukur jumlah pengangguran. Pengangguran merupakan keadaan dimana dalam sebuah masyarakat, sebagian warganya tidak mampu memasuki kesempatan kerja yang ada, sehingga ia tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan ekonominya. Secara alami pengangguran terjadi karena pada saat kesempatan kerja penuh (*full employment*) dimana 95% angkatan kerja dalam waktu tertentu sepenuhnya bekerja, angkatan kerja yang belum masuk dalam kesempatan kerja tersebut berarti menganggur (ILO, 1982).

Disamping investasi asing yang masuk dikedua negara tersebut juga terbilang rendah dan keadaan yang sama dialami pada tingkat pengangguran yang tergolong tinggi pada tabel *World Development Indicators (Uem)*. Dalam masalah pengangguran Indonesia dan India tidak menjadi yang paling buruk. Negara-negara Eropa dalam hal ini khususnya negara Spanyol dan Yunani memiliki tingkat pengangguran yang tinggi.

Berdasarkan beberapa data mengenai GDP, CPI, TAX, INV dan UEM tersebut semakin melengkapi bukti bahwa kelompok negara G-20 tidak seluruhnya memiliki anggota yang mapan diperekonomian. Kondisi yang terjadi dikedua negara tersebut menimbulkan pertanyaan kepada penulis, mengapa dengan keadaan tingkat korupsi, kualitas lembaga pemerintah, penerimaan pajak, investasi asing dan tingkat pengangguran yang bisa dikatakan buruk, kedua negara tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang melesat jauh meninggalkan tingkat pertumbuhan negara anggota G-20 lainnya. Hal tersebut berbanding terbalik

dengan keadaan beberapa anggota, yaitu ketika faktor yang dianggap mendukung pertumbuhan ekonomi mendapat prestasi yang cukup bagus justru pertumbuhan ekonominya rendah bahkan menurun. Hal ini menarik penulis untuk menjadikan kelompok negara G-20 sebagai sampel data dalam penelitian, Apakah *Grease Theory* terjadi di negara-negara G-20?

Berdasarkan keadaan negara tersebut maka peneliti menjadikan dasar untuk melakukan penelitian pengaruh dari korupsi yang sebenarnya dan berdasarkan seluruh uraian diatas maka peneliti mengangkat judul penelitian:

“ FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI PADA NEGARA G-20 (Pembuktian *Grease The Wheels Hypothesis*)

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas dapat diketahui faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara dalam hal ini kegiatan korupsi yaitu :

1. Korupsi secara umum dianggap sangat merugikan bagi pertumbuhan ekonomi Negara.
2. Masih terdapatnya pihak – pihak yang beranggapan bahwa korupsi meningkatkan efisiensi dalam suatu pekerjaan dan sudah menjadi hal yang wajar untuk dilakukan. Pemahaman ini berkaitan erat dengan paradigma yang terbentuk dimasyarakat maupun kalangan pegawai/pejabat negara dan dapat berpengaruh penting terhadap kualitas dari pemerintah pada negara tersebut.

3. Terdapat beberapa negara yang menunjukkan kecenderungan terbuktinya *Grease Theory*, dimana negara-negara tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi sementara tingkat korupsi nya tinggi dan kualitas lembaga pemerintah yang rendah, atau sebaliknya dimana tingkat pertumbuhannya rendah meskipun tingkat korupsi rendah dan kualitas lembaga pemerintahnya tinggi.
4. Kelompok negara G-20 memiliki anggota dengan kondisi yang tidak sama hal ini ditunjukkan dengan jumlah penerimaan pajak, investasi asing dan tingkat pengangguran yang beragam bahkan bertolak belakang.

Maka diperoleh perumusan masalah yang akan diteliti yaitu pengaruh korupsi pada suatu negara terhadap proses pertumbuhan ekonomi dengan pertanyaan penelitian

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas lembaga pemerintah dengan tingkat korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi negara G-20?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari penerimaan pajak, investasi asing dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi negara G-20?
3. Bagaimana sebenarnya pengaruh korupsi terhadap negara – negara anggota G-20?
4. Apakah *Grease Theory* / *Grease The Wheels Hypothesis* benar-benar dapat diterima?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh dari korupsi dan kualitas pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di negara G-20 sebagai variabel yang berperan dalam pembentukan *Grease Theory* dan mencari kebenarannya.
2. Apabila *Grease Theory* benar terbukti maka pengkajian lanjut dapat dilakukan untuk mengetahui apabila memang korupsi memberikan manfaat dan dapat diambil konsep nya tanpa membawa kerugian.

1.3.2. Kegunaan

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk memberikan gambaran tentang apa itu sebenarnya korupsi dan pengaruh nya secara nyata di lapangan.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan pola berpikir untuk mengerti dan memahami dampak dari korupsi secara riil dan dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya serta pengambilan sikap terhadap tindakan korupsi.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam memberikan gambaran mengenai isi skripsi ini, pembahasan dilakukan secara sistematis meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang berupa penjabaran teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis, hasil penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini. Bab ini juga akan menjelaskan tentang kerangka pemikiran penelitian yang akan diteliti serta hipotesis yang timbul dari pemikiran tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjabaran bagaimana penelitian akan dilakukan secara operasional. Sehingga berisikan variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang telah dianalisis dengan metode penelitian yang telah ditentukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan dan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1.2. Definisi dan Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut pandangan ekonom klasik mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang dan modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, (4) tingkat teknologi yang digunakan (Kuncoro,2004).

Menurut Kuznet pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya.

Menurut Todaro (2003), Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor,yaitu :

1. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja

Pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja yang notabnya merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemampuan pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi seberapa besar perekonomian dapat menyerap angkatan kerja yang bekerja produktif.

2. Akumulasi Modal

Akumulasi modal merupakan gabungan dari investasi baru yang di dalamnya mencakup lahan, peralatan fiskal dan sumber daya manusia yang digabung dengan pendapatan sekarang untuk dipergunakan memperbesar output pada masa datang.

3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi menurut para ekonom merupakan faktor terpenting dalam terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi memberikan dampak besar karena dapat memberikan cara-cara baru dan menyempurnakan cara lama dalam melakukan suatu pekerjaan.

Menurut Sadono (2000), alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Perekonomian wilayah akan mengalami kenaikan dari tahun ketahun dikarenakan adanya penambahan pada faktor produksi. Selain faktor produksi, jumlah angkatan kerja yang bekerja juga akan meningkat dari tahun ke tahun sehingga apabila dimanfaatkan dengan maksimal maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ada beberapa alat pengukur dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto apabila ditingkat nasional adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar.

2. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Produk domestik bruto per kapita dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan yang lebih baik dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk dalam skala daerah.

Model pertumbuhan ekonomi neoklasik yang dikemukakan oleh Solow (1956) menyatakan bahwa persediaan modal dan angkatan yang bekerja dan asumsi bahwa produksi memiliki pengembalian konstan merupakan hal-hal yang mempengaruhi besarnya output. Model pertumbuhan Solow juga dirancang untuk mengetahui apakah tingkat tabungan, stok modal, tingkat populasi dan kemajuan teknologi mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dilihat menggunakan PDRB per kapita sehingga diketahui apakah kesejahteraan masyarakat sudah tercapai atau belum.

2.1.1.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Ada beberapa model pertumbuhan ekonomi yang berkembang hingga saat ini, yaitu :

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi klasik merupakan salah satu dasar dari teori pertumbuhan yang dipakai baik dari dulu sampai sekarang. Teori pertumbuhan ekonomi klasik dikemukakan oleh tokoh-tokoh ekonomi seperti Adam Smith dan David Ricardo.

Menurut Smith (dalam Arsyad, 1999) membedakan dua aspek utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu : Pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Pada pertumbuhan output total sistem produksi suatu negara dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Sumber Daya Alam yang Tersedia

Apabila sumber daya alam belum dipergunakan secara maksimal maka jumlah penduduk dan stok modal merupakan pemegang peranan dalam pertumbuhan output. Sebaliknya pertumbuhan output akan terhenti apabila penggunaan sumber daya alam sudah maksimal.

2. Sumber Daya Insani

Jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan angkatan kerja yang bekerja dari masyarakat.

3. Stok Barang Modal

Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal.

2. Teori Pertumbuhan NeoKlasik

Teori pertumbuhan neo klasik dikembangkan oleh dua orang ekonom yaitu : Robert Solow dan Trevor Swan. Teori neoklasik berpendapat bahwa

pertumbuhan ekonomi bersumber pada penambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Teori pertumbuhan ini juga menekankan bahwa perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi merupakan faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi (Sadono, 2000).

Teori neoklasik juga membagi tiga jenis input yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Pengaruh modal dalam pertumbuhan ekonomi
2. Pengaruh teknologi dalam pertumbuhan ekonomi
3. Pengaruh angkatan kerja yang bekerja dalam pertumbuhan ekonomi

Teori neoklasik memiliki pandangan dari sudut yang berbeda dari teori klasik yaitu dari segi penawaran. Pertumbuhan ekonomi ini bergantung kepada fungsi produksi, persamaan ini dinyatakan dengan :

$$Y = TK^{\alpha} L^{1-\alpha} \dots\dots\dots(2.1)$$

dimana Y adalah output, K adalah modal, L adalah angkatan kerja yang bekerja dan T adalah teknologi. Karena tingkat kemajuan teknologi ditentukan secara eksogen maka model neo klasik Solow juga disebut model pertumbuhan eksogen. Model Solow memiliki beberapa kekurangan dan untuk memperbaikinya dengan memecah total faktor produksi dengan memasukan variabel lain, dimana variabel ini dapat menjelaskan pertumbuhan yang terjadi. Model ini disebut model pertumbuhan endogen.

Model pertumbuhan endogen beranggapan bahwa perdagangan internasional penting sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Model perdagangan internasional diukur melalui aktifitas ekspor dan impor, yaitu:

$$Y = F(A, K, L, i) \dots\dots\dots(2.2)$$

Dimana Y adalah output, A adalah indeks produktifitas, K adalah modal, L adalah angkatan kerja yang bekerja, i adalah tahun, sedangkan indeks produktifitas (A) adalah fungsi dari ekspor (X) dan impor (M), yaitu:

$$A_i = F(X_i, M_i) \dots\dots\dots(2.3)$$

Ada beberapa ahli ekonom seperti Mankiw, Romer dan Weil melakukan studi untuk penyempurnaan model pertumbuhan ekonomi neoklasik untuk memperjelas dan menambahkan dasar teoritis bagi sumber pertumbuhan ekonomi (Esa Suryaningrum, 2000). Model Solow hanya dapat menerangkan hubungan modal dan angkatan kerja yang bekerja saja, sehingga ditambahkan lagi variabel mutu modal manusia untuk membantu menjelaskan pola pertumbuhan ekonomi selain modal dan angkatan kerja yang bekerja, yaitu :

$$Y = TK^\alpha L^\beta H^{1-\alpha-\beta} \dots\dots\dots(2.4)$$

Dimana Y adalah output, K adalah modal, L adalah tenaga kerja, T adalah teknologi dan H adalah modal manusia.

3. Model Pertumbuhan Interregional

Model pertumbuhan interregional menambahkan faktor-faktor yang bersifat eksogen yang berarti tidak terikat kepada kondisi internal perekonomian wilayah. Model ini hanya membahas satu daerah dan tidak memperhatikan dampak dari daerah lain, maka model ini disebut dengan model interregional. Teori ini sebenarnya merupakan perluasan dari teori basis ekspor sehingga diasumsikan selain ekspor, pengeluaran pemerintah dan investasi bersifat eksogen dan saling terkait dengan satu sistem dari daerah lain. Teori neoklasik berpendapat faktor teknologi ditentukan secara eksogen dari model. Kekurangan dalam keberadaan teknologi ini yang menyebabkan munculnya teori baru yaitu teori pertumbuhan endogen.

4. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar merupakan penyempurnaan dari analisis Keynes yang dianggap kurang lengkap. Dalam teori ini Harrod-Domar menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Teori ini ingin menunjukkan syarat yang dibutuhkan supaya perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan baik (Arsyad, 1999).

Harrod-Domar (dalam Sadono, 2000), menyatakan supaya seluruh barang modal yang tersedia dapat digunakan sepenuhnya, permintaan agregat harus bertambah sebanyak kenaikan kapasitas barang modal yang terwujud sebagai akibat dari investasi masa lalu. Jadi untuk menjamin pertumbuhan

ekonomi yang baik maka nilai investasi dari tahun ketahun harus selalu naik.

Model pertumbuhan Harrod-Domar secara sederhana dapat dituliskan sebagai berikut :

1. Tabungan (S) merupakan suatu proporsi (s) dari output total (Y), maka secara persamaan :

$$S=sY \dots\dots\dots(2.5)$$

2. Investasi (I) didefinisikan sebagai perubahan stok modal (K) yang diwakili oleh ΔK , sehingga persamaanya :

$$I= \Delta K \dots\dots\dots(2.6)$$

Karena jumlah stok modal K mempunyai hubungan langsung dengan jumlah pendapatan nasional Y seperti ditunjukkan rasio modal-output, k, maka :

$$I=k\Delta Y \dots\dots\dots(2.7)$$

3. Versi sederhana dari teori Harrod-Domar,yaitu :

$$I=S \dots\dots\dots(2.8)$$

Dari persamaan teori Harrod-Domar dapat dijelaskan terdapat hubungan positif antara pendapatan nasional dengan rasio tabungan apabila terdapat kenaikan GDP maka rasio tabungan akan naik. Hal ini akan terjadi apabila tidak ada pengaruh dari pemerintah. Harrod-Domar menjelaskan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat mudah, yaitu dengan menabung atau berinvestasi sebanyak mungkin dan laju pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

5. Teori Pertumbuhan Kuznet

Pertumbuhan ekonomi Kuznet menunjukkan adanya kemampuan jangka panjang dari pertumbuhan ekonomi suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi kepada rakyatnya. Hal ini dapat dicapai apabila ada kemajuan dibidang teknologi, kelembagaan dan penyesuaian idiologi.

Teori pertumbuhan Kuznet dalam analisisnya menambahkan enam karakteristik pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu :

1. Tingginya tingkat pendapatan perkapita
2. Tingginya produktifitas tenaga kerja
3. Tingginya faktor transformasi struktur ekonomi
4. Tingginya faktor transformasi sosial idiologi
5. Kemampuan perekonomian untuk melakukan perluasan pasar
6. Adanya kesadaran, bahwa pertumbuhan ekonomi sifatnya terbatas

2.1.1.4. *Gross Domestic Product*

2.1.1.4.1. Pengertian GDP

Gross domestic product atau Produk domestik bruto, merupakan nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh pekerja dan property yang berada di suatu daerah, yang biasanya disebut negara. GDP dapat juga didefinisikan sebagai sebuah ukuran keseluruhan dari produksi total ekonomi sebuah negara, GDP mencerminkan nilai pasar untuk semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu Negara untuk suatu periode tertentu (Mahadana Learning, 2008).

Sedangkan menurut McEachern (2000), GDP artinya mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. GDP juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat.

Gross domestic product hanya mencakup barang dan jasa akhir, yaitu barang dan jasa yang dijual kepada pengguna yang terakhir. Untuk barang dan jasa yang dibeli untuk diproses lagi dan dijual lagi (barang dan jasa intermediate) tidak dimasukkan dalam GDP untuk menghindari masalah double counting atau penghitungan ganda, yaitu menghitung suatu produk lebih dari satu kali.

Komponen GDP antara lain konsumsi personal, pembelian pemerintah, persediaan, dan neraca perdagangan (ekspor dan impor). GDP dirilis per kuartal, yang seringkali ditampilkan dalam basis persentase tahunan. Mayoritas data yang ditampilkan dalam indikator yang telah mengalami penyesuaian terhadap perubahan harga (Mahadana Learning, 2008). Indikator GDP merupakan sebuah laporan yang sangat komprehensif dan detail. Penjualan ritel, konsumsi personal, dan persediaan grosir, kesemuanya digunakan untuk menghitung GDP (Mahadana Learning, 2008).

Maka dapat disimpulkan bahwa GDP merupakan salah satu indikator dari keberhasilan ekonomi suatu Negara. Negara yang baik tingkat ekonominya diindikasikan dengan tingginya tingkat GDP.

Contohnya, grosir membeli sekaleng tuna seharga Rp 6.000,- dan menjualnya seharga Rp 9.000,-. Jika GDP menghitung kedua transaksi tersebut, Rp 6.000,- dan Rp 9.000,-, maka sekaleng tuna itu dihitung senilai Rp 15.000,- (lebih besar daripada nilai akhirnya). Jadi, GDP hanya menghitung nilai akhir dari suatu produk yaitu sebesar Rp 9.000,-. Untuk barang yang diperjual-belikan berulang kali (second-hand) tidak dihitung dalam GDP karena barang tersebut telah dihitung pada saat diproduksi. (Mahadana Learning, 2008).

2.1.1.4.2. Tipe-tipe GDP

Ada dua tipe GDP, yaitu :

1. GDP dengan harga berlaku atau GDP nominal, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu tahun dinilai menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut.
2. GDP dengan harga tetap atau GDP riil, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu tahun dinilai menurut harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun lain. Angka-angka GDP merupakan hasil perkalian jumlah produksi (Q) dan harga (P), kalau harga-harga naik dari tahun ke tahun karena inflasi, maka besarnya GDP akan naik pula, tetapi belum tentu kenaikan tersebut menunjukkan jumlah produksi (GDP riil). Mungkin kenaikan GDP hanya disebabkan oleh kenaikan harga saja, sedangkan volume produksi tetap atau merosot.

2.1.1.3.3. Perhitungan GDP

Menurut McEachern (2000) ada dua macam pendekatan yang digunakan dalam perhitungan GDP, yaitu:

1. Pendekatan pengeluaran, menjumlahkan seluruh pengeluaran agregat pada seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi selama satu tahun.
2. Pendekatan pendapatan, menjumlahkan seluruh pendapatan agregat yang diterima selama satu tahun oleh mereka yang memproduksi output tersebut.

2.1.1.3.4. GDP berdasarkan Pendekatan Pengeluaran.

Menurut McEachern (2000) untuk memahami pendekatan pengeluaran pada GDP, kita membagi pengeluaran agregat menjadi empat komponen, konsumsi, investasi, pembelian pemerintah, dan ekspor netto. Kita akan membahasnya satu per satu.

1. Konsumsi, atau secara lebih spesifik pengeluaran konsumsi perorangan, adalah pembelian barang dan jasa akhir oleh rumah tangga selama satu tahun. Contohnya : dry cleaning, potong rambut, perjalanan udara, dsb.
2. Investasi, atau secara lebih spesifik investasi domestik swasta bruto, adalah belanja pada barang kapital baru dan tambahan untuk persediaan. Contohnya : bangunan dan mesin baru yang dibeli perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa.
3. Pembelian pemerintah, atau secara lebih spesifik konsumsi dan investasi bruto pemerintah, mencakup semua belanja semua tingkat pemerintahan pada barang dan jasa, dari pembersihan jalan sampai pembersihan ruang

pengadilan, dari buku perpustakaan sampai upah petugas perpustakaan. Di dalam pembelian pemerintah ini tidak mencakup keamanan sosial, bantuan kesejahteraan, dan asuransi pengangguran. Karena pembayaran tersebut mencerminkan bantuan pemerintah kepada penerimanya dan tidak mencerminkan pembelian pemerintah.

4. Ekspor netto, sama dengan nilai ekspor barang dan jasa suatu negara dikurangi dengan impor barang dan jasa negara tersebut. Ekspor netto tidak hanya meliputi nilai perdagangan barang tetapi juga jasa.

Dalam pendekatan pengeluaran, pengeluaran agregat negara sama dengan penjumlahan konsumsi, C , investasi, I , pembelian pemerintah, G , dan ekspor netto, yaitu nilai ekspor, X , dikurangi dengan nilai impor, M , atau $(X-M)$.

Penjumlahan komponen tersebut menghasilkan pengeluaran agregat, atau GDP:

$$C + I + G + (X-M) = \text{Pengeluaran agregat} = \text{GDP} \dots\dots\dots(2.1)$$

2.1.1.3.5. GDP berdasarkan Pendekatan Pendapatan.

Menurut McEachern (2000) pendapatan agregat sama dengan penjumlahan semua pendapatan yang diterima pemilik sumber daya dalam perekonomian (karena sumber dayanya digunakan dalam proses produksi). Sistem pembukuan double-entry dapat memastikan bahwa nilai output agregat sama dengan pendapatan agregat yang dibayarkan untuk sumber daya yang digunakan dalam produksi output tersebut: yaitu upah, bunga, sewa, dan laba dari produksi.

Jadi kita dapat mengatakan bahwa:

$$\text{Pengeluaran agregat} = \text{GDP} = \text{Pendapatan agregat}$$

Suatu produk jadi biasanya diproses oleh beberapa perusahaan dalam perjalanannya menuju konsumen. Meja kayu, misalnya, mulanya sebagai kayu mentah, kemudian dipotong oleh perusahaan pertama, dipotong sesuai kebutuhan mebel oleh perusahaan kedua, dibuat meja oleh perusahaan ketiga, dan dijual oleh perusahaan keempat. Double counting dihindari dengan cara hanya memperhitungkan nilai pasar dari meja pada saat dijual kepada pengguna akhir atau dengan cara menghitung nilai tambah pada setiap tahap produksi. Nilai tambah dari setiap perusahaan sama dengan harga jual barang perusahaan tersebut dikurangi dengan jumlah yang dibayarkan atas input perusahaan lain.

Nilai tambah dari tiap tahap mencerminkan pendapatan atas pemilik sumber daya pada tahap yang bersangkutan. Penjumlahan nilai tambah pada semua tahap produksi sama dengan nilai pasar barang akhir, dan penjumlahan nilai tambah seluruh barang dan jasa akhir adalah sama dengan GDP berdasarkan pendekatan pendapatan.

2.1.2. Korupsi

2.1.2.1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Korupsi merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat negara yang

diberi amanah untuk mengelola kekuasaan demi menjaga dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. (www.ti.or.id yang diakses 27 Maret 2014)

Lembaga *Transparency International* (TI) mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunaan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya. Sementara *World Bank* mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Keuntungan pribadi yang dimaksud bukan hanya secara individu, tetapi juga terhadap suatu partai politik, suatu kelompok tertentu dalam masyarakat, suku, teman atau keluarga. Definisi ini menunjukkan korupsi yang terjadi pada tingkat birokrasi, dan tidak terjadi pada sektor swasta (Tika Widiastuti, 2008).

Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector dalam studi kasusnya yang berjudul *Corruption and Poverty : A Review of Recent Literature* (2003) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi dapat dibedakan menjadi penggelapan, nepotisme, penyuapan, pemerasan, *influence peddling*, dan penipuan.

UU No 33 tahun 1999 junto UU No 20 tahun 2001 menyebutkan ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi 7 kategori, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan/atau jasa, serta gratifikasi.

Christopher Stueckelberger (dalam Tika Widiastuti, 2008) menyatakan bahwa korupsi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Merupakan sarana untuk mendapatkan sesuatu,
2. Jenis kegiatan yang tersembunyi dan tidak transparan,
3. Pencarian keuntungan pribadi secara tidak sah,
4. Pendapatan sesuatu yang bukan haknya secara tidak sah,
5. Penggunaan dana secara tidak efisien,
6. Sering berhubungan dengan pemerasan, penyalahgunaan posisi publik, nepotisme,
7. Penyalahgunaan kepercayaan,
8. Perusakan integritas moril dan etos umum, dan
9. Pelanggaran hukum dengan disintegritas hukum.

Korupsi saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Motif melakukan korupsi secara politik yaitu untuk mendapatkan kekuasaan, sedangkan secara ekonomi untuk mendapatkan akses lebih ke sumber-sumber ekonomi untuk mendapatkan pendapatan yang lebih.

Bentuk dan motif korupsi menurut Stueckelberger (dalam Tika Widiastuti, 2008), yaitu :

1. Korupsi kemiskinan (*corruption of poverty*) yang disebut juga sebagai korupsi kecil, yaitu korupsi yang berakar dalam kemiskinan. Contohnya apabila pegawai-pegawai pemerintah tidak mendapat gaji yang dapat mencukupi kebutuhannya.

2. Korupsi kekuasaan (*corruption of power*) yang disebut korupsi besar, yaitu berakar dari nafsu untuk memiliki lebih banyak kekuasaan, pengaruh, dan kesejahteraan atau dalam mempertahankan kekuasaan dan posisi ekonomi yang telah dimiliki.
3. Korupsi untuk mendapatkan sesuatu (*corruption of procurement*) dan korupsi untuk mempercepat urusan (*corruption of acceleration*) yaitu untuk mendapatkan barang atau jasa, tanpa korupsi maka memperolehnya akan tidak tepat waktu atau membutuhkan biaya administratif yang lebih besar.

Syed Hussein Alatas (dalam Tika Widiastuti, 2008) membedakan tujuh tipologi korupsi, yaitu :

1. *Transactive corruption*, yaitu korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal-balik antara pihak penyuap dan penerima suap demi keuntungan kedua belah pihak.
2. *Extortive corruption* (korupsi yang memeras), yaitu pihak pemberi dipaksa menyuap untuk mencegah kerugian yang mengancam dirinya, kepentingannya, dan hal-hal yang dihargainya.
3. *Insentive corruption*, korupsi dalam bentuk pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
4. *Supportive corruption*, korupsi yang secara tidak langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

5. *Nepotistic corruption*, yaitu korupsi yang menunjukkan tidak sahnya teman atau sanak famili untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau perilaku yang memberi tindakan dengan mengutamakan dalam bentuk uang atau lainnya kepada teman atau sanak famili secara bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku.
6. *Defensive corruption*, yaitu perilaku korban korupsi dengan pemerasan untuk mempertahankan diri. Tipe ini bukan pelaku korupsi, karena perbuatan orang yang diperas bukanlah korupsi. Hanya perbuatan pelaku yang memeraslah yang disebut korupsi.
7. *Autogenic corruption*, adalah korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri.

2.1.2.2. *Corruption Perception Index (CPI)*

Pengukuran Korupsi dilakukan dengan menggunakan *Corruption Perception Index (CPI)* yang merupakan indeks gabungan yang mengukur persepsi korupsi secara global. CPI digunakan untuk membandingkan kondisi korupsi di suatu negara terhadap negara lain. CPI mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi.

CPI direpresentasikan dalam bentuk bobot skor/angka (*score*) dengan rentang 0-10. Skor 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 10 berarti dipersepsikan sangat bersih dari korupsi.

Indeks gabungan ini berasal dari 13 (tiga belas) data korupsi yang dihasilkan oleh berbagai lembaga independen yang kredibel. Mereka

menggunakan metode dan penilaian yang berbeda dalam analisisnya. Lembaga-lembaga tersebut adalah *African Development Bank, the Bertelsmann Foundation, the Economist Intelligence Unit, Freedom House, Global Insight, International Institute for Management Development, Political and Economic Risk Consultancy, Political Risk Services, the World Economic Forum, the World Bank and the World Justice Project.*

Negara-negara harus dinilai oleh setidaknya tiga sumber untuk muncul di CPI. Ke 13 survei / penilaian merupakan survei opini para pelaku bisnis atau penilaian kinerja dari sekelompok analis. Pada awalnya CPI yang menggunakan survei opini publik.

CPI mengukur persepsi korupsi karena sulitnya mengukur tingkat korupsi secara absolut.

2.1.3. *Worldwide Governance Indicators (WGI)*

World Governance Indicators (WGI) merupakan kumpulan indikator di bidang *governance* yang diterbitkan oleh World Bank, melalui *Macroeconomics and Growth Team-Development Research Group*, sejak tahun 1996. WGI mengukur enam dimensi *governance*, yakni (1) *Voice and accountability*, (2) *Political stability and absence of violence*, (3) *Government effectiveness*, (4) *Regulatory quality*, (5) *Rule of law*, dan (6) *Control of corruption*, dengan cakupan hingga 200 negara.

Penelitian mengenai “*Good Governance*” telah dimulai sejak awal tahun 1990, tujuannya adalah untuk mencapai pembangunan dan tujuan dari pembangunan itu sendiri. World Bank menggambarkan “*Good Governance*”

sebagai keterbukaan, dapat dipahami, dan dapat diprediksi dalam setiap pengambilan kebijakannya *“epitomized by predictable, open and enlightened policy making; a bureaucracy imbued with a professional ethos; an executive arm of government accountable for its actions; and a strong civil society participating in public affairs; and all behaving under the rule of law”* (World Bank, 1994).

Dalam perkembangannya, dilatar belakangi keinginan untuk mengukur kualitas dari suatu pemerintahan menyebabkan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk memahaminya semakin bermunculan dan salah satu diantaranya adalah *“World Governance Indicators”* yang dikeluarkan oleh World Bank. Dalam pengukurannya World Bank mengambil enam aspek untuk menentukan apakah suatu negara dapat dikatakan memiliki *“Good Governance”* atau sebaliknya. Aspek-aspek tersebut adalah: *Voice and Accountability, Political Stability and Violence, Government Effectiveness, Rule of Law, Regulatory Quality, and Control of Corruption*. Indikator ini digunakan oleh banyak peneliti dari berbagai negara.

Penyusunan WGI dilakukan melalui pengolahan atas ratusan variabel individual yang didasarkan dari berbagai sumber data. Data-data ini merupakan persepsi dari berbagai kalangan, seperti pemerintah, swasta dan NGO, dalam memandang governance. Update atas Laporan WGI diterbitkan 2 (dua) tahun sekali sejak 1996 – 2002 dan tahun berikutnya dilakukan setiap tahun.

Metode yang dipergunakan dalam penghitungan dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Metode yang digunakan adalah pendekatan statistik. Prosedur statistikal yang digunakan untuk mendapatkan hasil perhitungan aggregate tiap indeks adalah *unobserved components model*, dimana tahapan yang dilakukan adalah:
 - a. *Me-rescale* tiap individual data yang ada agar dapat digunakan satu skala yang *comparable*
 - b. Pembobotan masing-masing *re-scaled* data dengan cara perhitungan statistik dimana data yang mempunyai korelasi paling tinggi terhadap *dependent variable* maka akan diberi bobot yang lebih tinggi dibandingkan data dengan korelasi rendah
 - c. Dan dihitung *weighted average* nya, dimana *weighted average* adalah:
(bobot x rata-rata nilai re-scaled data)
2. Yang perlu menjadi perhatian khusus dalam perhitungan indeks ini adalah dalam metode pembobotan, karena beberapa variable tertentu mempunyai korelasi yang tinggi sehingga penurunan atau kenaikan bobot akan berpengaruh signifikan terhadap aggregate indeks.

Definisi dari aspek indikator tersebut telah banyak mengalami perubahan sejak 10 tahun yang lalu. Dan yang paling terkini seperti dijelaskan oleh Kaufmann et al. definisi dari aspek-aspek tersebut dipahami sebagai berikut :

1. *Control of Corruption*

Indeks ini mengukur persepsi korupsi dimana korupsi diartikan sebagai penggunaan kekuasaan publik untuk meraih keuntungan. Korupsi dalam konteks ini disebabkan karena rendahnya tingkat kepatuhan aparat pemerintah dan sektor swasta terhadap institusi-institusi Negara. Indeks ini

terdiri dari berbagai indikator yang mengukur transparansi pemerintahan, persepsi publik mengenai korupsi, dan pola-pola nepotisme dan kronisme.

2. *Government Effectiveness*

Indeks ini mengukur kualitas dari pengaturan pelayanan publik, kualitas birokrasi, kompetensi SDM pelayanan publik dan tingkat independensi SDM aparatur dari tekanan politik. Indeks ini menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mengambil kebijakan dan mengadakan pelayanan publik secara efektif.

3. *Rule of Law*

Indeks ini mengukur tingkat kepercayaan dan harapan terhadap tegaknya berbagai aturan hukum dalam masyarakat. Situasi kondusif bagi keberlangsungan aktivitas social dan ekonomi merupakan elemen yang sangat penting untuk mengukur tingkat efektivitas pemerintah. Indeks ini terdiri berbagai indicator yang mengukur persepsi mengenai tindakan kriminal, kualitas peradilan, dan penegakan kontrak atau perjanjian.

4. *Regulatory Quality*

Indeks ini mengukur akibat-akibat yang ditimbulkan dari kebijakan yang tidak pro-pasar, seperti kebijakan control harga, rendahnya pengawasan terhadap bank, serta persepsi mengenai berbagai hambatan yang disebabkan bertumpuknya regulasi atau peraturan dibidang perdagangan internasional. Indeks ini terdiri dari variable-variabel yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dibidang perdagangan, investasi luar negeri, dan nilai tukar.

5. *Voice and Accountability*

Indeks ini mengukur berbagai aspek dari proses politik, kebebasan sipil dan hak politik, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Indeks ini terdiri dari berbagai indikator yang mengukur hak-hak politik, kebebasan sipil, mekanisme pemilihan umum, dan kebebasan pers.

6. *Political Stability and Absence of Violence*

Indeks ini mengukur persepsi tentang kemungkinan pemerintah digulingkan dengan cara-cara yang inkonstitusional atau dengan jalan kekerasan. Indeks ini terdiri dari berbagai indikator yang mengukur kadar kekerasan politik, kasus-kasus penyiksaan dan penculikan, ancaman pemberontakan, dan kemampuan pemerintah dalam menghadapi ancaman tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan indeks dari *Government Effectiveness* untuk menggambarkan suatu kondisi dari kualitas kinerja pemerintah.

2.1.4. Pajak

2.1.4.1. Pengertian Pajak

Andriani dalam Barata dan Ardian (1989) mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan pajak menurut Soemitro dalam Suharno (2003) adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara

untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk public saving yang menurut sumber utama untuk membiayai public investment.

Apabila ditelaah lebih dalam ternyata di dalam definisi pajak tersebut terkandung maksud:

1. Iuran yang dapat dipaksakan, pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa dan sita. Kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dikenakan hukuman (sanksi) berupa hukuman denda, kurungan maupun penjara.
2. Setiap wajib pajak yang membayar iuran/pajak kepada negara tidak akan mendapat balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan. Tetapi imbalan yang secara tidak langsung diperoleh Wajib Pajak berupa pelayanan pemerintah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan sarana irigasi, jalan, sekolah, dan sebagainya.

Dalam rangka penerimaan pajak perlu diketahui teori-teori yang melatar belakangi dilakukannya pemungutan pajak, sebagaimana diungkapkan Rimsky dalam Suharno (2003), yaitu:

1. Teori Asuransi.

Dalam teori ini ditekankan mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak seperti yang berlaku dalam perjanjian asuransi, di mana perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk keselamatan dan keamanan jiwa serta harta benda diperlukan suatu pembayaran dalam bentuk pajak.

2. Teori Kepentingan.

Penekanan teori ini adalah mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak berdasarkan besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara.

3. Teori Bakti.

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak dari warganya sebagai tindak lanjut teori kepentingan dalam hal penyediaan fasilitas umum yang diselenggarakan oleh negara.

4. Teori Daya Pikul.

Keadilan dan keabsahan negara dalam memungut pajak dari warganya didasarkan pada kemampuan dan kekuatan masing-masing anggota masyarakatnya, dan bukan pada besar kecilnya kepentingan.

5. Teori Daya Beli.

Keadilan dan keabsahan pemungutan pajak yang dilakukan negara ini lebih cenderung melihat aspek akibat yang baik terhadap kedua belah pihak (masyarakat dan negara) sehingga negara dapat memanfaatkan kekuatan dan kemampuan beli (daya beli) masyarakat untuk kepentingan negara yang pada akhirnya akan dikembalikan atau disalurkan kembali kepada masyarakat.

2.1.4.2. Fungsi pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2007) dalam bukunya “Perpajakan Indonesia”, Fungsi pajak dibedakan menjadi dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas

keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.4.3. Asas pemungutan

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain:

1. Menurut Adam Smith dalam bukunya "*Wealth of Nations*" dengan ajaran yang terkenal "The Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

- b. Asas *Certainty* (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
 - c. Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
 - d. Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.
2. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
- a. Asas politik finansial: pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
 - b. Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah
 - c. Asas keadilan: pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
 - d. Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
 - e. Asas yuridis: segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

2.1.4.4. Teori pemungutan

Menurut R. Santoso Brotodiharjo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

1. Teori asuransi, menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.
2. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

2.1.5. Investasi Asing

2.1.5.1. Pengertian Investasi

Investasi asing atau Penanaman Modal Asing / *Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu tidak

hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri (Krugman, 1994)

2.1.5.2. Teori Investasi Asing

Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi Investasi asing, yaitu :

1. Teori R. Vernon

Vernon (1966) menjelaskan penanaman modal asing dengan model yang disebut Model Siklus Produk (Pandji Anoraga, 1995). Dalam model ini, introduksi dan pengembangan produk baru di pasar mengikuti tiga tahap. Pendorong untuk mengembangkan produk baru diberikan oleh kebutuhan dan peluang pasar. Dalam tahap satu, pada waktu produk pertama kali dikembangkan dan dipasarkan, diperlukan suatu hubungan yang erat antara kelompok desain, produksi dan pemasaran dari perusahaan dan pasar yang akan dilayani oleh produk itu. Untuk itu produksi dan penjualan perlu dilakukan di dalam negeri. Tahap kedua yakni perusahaan mulai memikirkan kemungkinan mencari pasar – pasar baru di negara – negara yang relatif maju dan ekspor pun mulai dilakukan dengan tujuan negara dunia ketiga. Keuntungan perusahaan terletak pada skala ekonomi dalam produksi, pengangkutan dan pemasaran. Strategi – strategi penentuan harga dan lokasi didasarkan atas aksi dan reaksi multinational corporation yang lain dan bukan pada biaya komperatif. Tahap ketiga atau tahap terakhir yakni dimana produk telah terbuat dengan baik dengan desain yang distandarisasi, sehingga riset keterampilan

manajemen tidak lagi penting. Tenaga kerja yang tidak terampil dan setengah terampil mulai mendapat tempat dan konsekuensinya, produk bergerak ke negara – negara yang sedang berkembang, dimana ongkos tenaganya masih lebih rendah. Produk – produk yang dihasilkan di negara berkembang tersebut akan diimpor kembali ke negara asal dan juga ke pasar negara yang lebih maju. Oleh karena itu, lokasi produksi akan lebih ditentukan oleh perbedaan biaya dari jarak pasar. Investasi luar negeri akan dilihat sebagai suatu cara untuk dapat mempertahankan daya saing perusahaan dalam produk – produk inovatifnya.

2. Teori J.H Dunning

John Dunning (1977) dalam menjelaskan faktor – faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing melalui teori ancangan eklektis (Pandji Anoraga, 1995). Teori eklektis menetapkan suatu set yang terdiri dari tiga persyaratan yang diperlukan bila sebuah perusahaan akan berkecimpung dalam penanaman modal asing.

Yang pertama adalah adanya keunggulan spesifik perusahaan. Rentang keunggulan yang dapat menumbuhkan FDI adalah :

- a. Teknologi pemilikan disebabkan karena kegiatan penelitian dan pengembangan.
- b. Keterampilan manajerial, pemasaran, atau lainnya yang spesifik untuk fungsi organisasi perusahaan.
- c. Defereniasi produk, merk dagang atau nama cap.
- d. Ukuran besar, yang mencerminkan skala ekonomi.

- e. Keperluan modal yang besar untuk pabrik dengan ukuran efisien minimum.

Yang kedua adalah keunggulan internalisasi. Kondisi yang menyokong internalisasi meliputi :

- a. Biaya tinggi dalam membuat dan melaksanakan kontrak.
- b. Ketidakpastian pembeli tentang nilai teknologi yang dijual.
- c. Kebutuhan untuk mengendalikan penggunaan atau penjualan kembali produk.
- d. Keunggulan untuk menggunakan diskriminasi harga atau subsidi ulang (cross-subsidization).

Yang ketiga adalah keunggulan spesifik negara. Keunggulan spesifik lokasi dari negara tuan rumah dapat meliputi :

- a. Sumber daya alami.
- b. Kekuatan tenaga kerja biaya rendah yang efisien dan terampil.
- c. Rintangan perdagangan membatasi impor.

Yang pertama dan kedua dapat menghasilkan FDI yang mengarahkan ke ekspor maupun produksi untuk pasar lokal. Yang ketiga hanya akan berkaitan dengan produksi lokal saja.

3. Teori David K. Eiteman

Menurut David K. Eiteman (1989), motif yang mendasari penanaman modal asing ada tiga, yaitu : motif strategis, motif perilaku dan motif ekonomi (Pandji Anoraga, 1995). Dalam motif strategis dibedakan dalam :

- a. Mencari pasar
- b. Mencari bahan baku
- c. Mencari efisiensi produksi
- d. Mencari pengetahuan
- e. Mencari keamanan politik.

Sedangkan motif perilaku merupakan ransangan lingkungan eksternal dan yang lain dari organisasi didasarkan pada kebutuhan dan komitmen individu atau kelompok.

Motif ekonomi merupakan motif untuk mencari keuntungan dengan cara memaksimalkan keuntungan jangka panjang dan harga pasar saham perusahaan.

2.1.6. Pengangguran

2.1.6.1. Pengertian Pengangguran

Pengangguran merupakan keadaan dimana dalam sebuah masyarakat, sebagian warganya tidak mampu memasuki kesempatan kerja yang ada, sehingga ia tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan ekonominya. Secara alami pengangguran terjadi karena pada saat kesempatan kerja penuh (*full employment*) dimana 95% angkatan kerja dalam waktu tertentu sepenuhnya bekerja, angkatan kerja yang belum masuk dalam kesempatan kerja tersebut berarti menganggur. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang

sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya (ILO, 1982).

2.1.6.2. Jenis dan macam pengangguran

Menurut ILO (1982) ada tiga jenis pengangguran yaitu:

1. Pengangguran Friksional / *Frictional Unemployment*: Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerna penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.
2. Pengangguran Musiman / *Seasonal Unemployment*: Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, tukang jualan duren yang menanti musim durian.
3. Pengangguran Siklikal ; Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja.

2.1.6.3. Teori Pengangguran

1. Teori kependudukan dari Malthus

Pokok teori Malthus ini adalah pemikiran bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melampaui pertumbuhan persediaan makanan, Malthus menyuguhkan idenya bahwa penduduk cenderung tumbuh secara “deret ukur” (misalnya, dalam lambang 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya) sedangkan persediaan makanan cenderung bertumbuh secara “deret hitung” (misalnya, dalam deret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya). Dalam karya-karyanya yang terbit belakangan, Malthus menekankan lagi tesisnya, tetapi tidak sekaku semula, dengan hanya berkata bahwa penduduk cenderung bertumbuh secara tak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan. Dari kedua bentuk uraian tesis itu, Malthus berkesimpulan bahwa kuantitas manusia akan kejeblus ke dalam kemiskinan kelaparan. Dalam jangka panjang, tak ada kemajuan teknologi yang dapat mengalihkan keadaan itu, karena kenaikan suplai makanan terbatas, sedangkan “pertumbuhan penduduk tak terbatas, dan bumi tak mampu memproduksi makanan buat menjaga eksistensi manusia.”

Apabila ditelaah lebih dalam teori Malthus ini yang menyatakan penduduk cenderung bertumbuh secara tak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan, dan hal ini menimbulkan manusia saling bersaing untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya dengan cara mencari sumber makanan, dengan persaingan ini maka akan ada sebagian manusia yang tersisih dan tidak mampu lagi memperoleh bahan makanan. Pada masyarakat modern dapat diartikan bahwa dengan semakin pesatnya jumlah penduduk

menghasilkan angkatan kerja yang semakin banyak pula, namun hal ini tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada. Karena jumlah kesempatan kerja yang semakin sedikit itulah kemudian antara individu satu dengan yang lain saling bersaing untuk memperoleh pekerjaan, dan yang tersisih dalam persaingan tersebut menjadi golongan penganggur. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori ini bisa digunakan untuk menganalisis tentang pengangguran.

2. Teori fungsionalisme struktural

Teori fungsionalisme struktural menganggap bahwa masyarakat sebagai sebuah organisme biologis yang mempunyai organ-organ yang saling berkaitan. Masyarakat seperti organism tersebut dinyatakan sebagai sistem-sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling tergantung, apabila satu bagian rusak atau tidak barjalan maka hal ini akan mempengaruhi sistem yang lain, Menurut Spencer (dalam Poloma, 1984) Masyarakat sebagai suatu organism hidup adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat dan organisme hidup sama-sama mengalami pertumbuhan bersama-sama berubah dan tumbuh.
- b. Karena disebabkan oleh pertumbuhan dalam ukurannya maka struktur sosial maupun organisme mengalami pertumbuhan pula,
- c. Tiap bagian yang tumbuh dari organism biologis maupun organisme sosial memiliki fungsi dan tujuana tertentu dan tumbuh menjadi organism yang berbeda dengan tugas masing-masing yang berbeda pula.

- d. Perubahan yang ada dalam suatu bagian dalam keduanya akan mengakibatkan perubahan pada bagian lain dan akhirnya akan mengakibatkan perubahan pada bagian lain.
- e. Bagian tersebut walaupun saling berkaitan dan merupakan struktur mikro yang dapat dipelajari terpisah.

Dalam kaitannya dengan masalah pengangguran di Indonesia dengan menggunakan perspektif fungsionalisme struktural ini maka dapat dikatakan bahwa dengan semakin banyaknya pengangguran dalam masyarakat maka akan mempengaruhi berbagai macam system yang ada dalam masyarakat tersebut. Dalam hal ini adalah system ekonomi akan menjadi sangat lemah, kemudian akan mempengaruhi sistem yang lain seperti sistem politik, karena dengan adanya pengangguran yang semakin besar maka akan mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada menjadi semakin berkurang dan pemerintah dianggap gagal.

3. Teori modernitas dan modernisasi

Poggi (1993) Berdasarkan karya George Simmel tentang pandangannya mengenai modernitas (Dalam Ritzer 2003) menyatakan bahwa dalam modernitas; pertama, dapat memberikan keuntungan bagi manusia karena dengan adanya modernisasi manusia mampu mengungkapkan berbagai potensi yang masih tersembunyi dan belum diketahui sebelumnya. Kedua, Besarnya pengaruh uang dan materi dalam masyarakat modern. Ketiga, akibat merugikannya yang dapat ditimbulkan uang dan modernitas.

Dengan adanya modernisasi terutama dengan penemuan berbagai macam teknologi baru yang mempengaruhi manusia menyebabkan manusia masa kini atau lebih sering disebut sebagai manusia modern menjadi mampu mengetahui berbagai macam hal dan meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut manusia saat ini menjadi manusia yang sangat terpengaruh dengan industri yang pada akhirnya hanya menginginkan menambah materi dan uang yang menjadi sangat mempengaruhi masyarakat. Dan pada akhirnya setiap individu yang ingin mengejar materi dan uang tersebut bersaing satu sama lain terutama untuk memperoleh kesempatan dalam perindustrian, namun ada sebagian individu yang tersisih dalam persaingan tersebut dan menjadi kaum penganggur dalam masyarakat industri.

4. Teori sosiologi ekonomi Neo-Marxian

Berawal dari analisis Marx pada awal abad 20 tentang struktur dan proses ekonomi yang dapat dibayangkan sebagai sistem kapitalisme kompetitif. Industri kapitalis yang ada pada zaman itu tergolong masih kecil dan belum ada satupun yang memegang perekonomian dan mengendalikan pasar. Namun Marx yakin pada suatu saat apabila kapitalisme sudah muncul dengan demikian pesatnya maka akan memunculkan kompetisi antar industri yang menjadi semakin pesat dan kemudian menghasilkan sistem monopoli dari industri yang paling kuat dalam persaingan tersebut. Dengan munculnya monopoli modal ini maka akan ada satu perusahaan besar yang akan mengendalikan perusahaan-perusahaan lain dalam perekonomian kapitalis.

Dalam pengembangan analisis Marx yang dianut oleh para penganut Marxian yang baru ini konsep “kelas buruh “ tidak mendeskripsikan sekelompok orang atau sekelompok pekerjaan tertentu, tetapi lebih merupakan pembelian dan penjualan tenaga kerja. Para tenaga kerja tidak mempunyai alat produksi sama sekali sehingga segolongan orang terpaksa menjual tenaga mereka kepada sebagian kecil orang yang mempunyai alat produksi (Beverment dalam Ritzer 2003).

Dari uraian diatas maka dapat kita telaah lagi bahwa dengan adanya pergantian antara sistem kapitalis kompetitif menjadi kearah sistem kapitalis monopoli, maka akan terdapat sebagian perusahaan yang masi tidak mampu bersaing dan menjadi terpuruk. Apabila semua proses produksi dan pemasaran semua terpengaruh oleh sebuah perusahaan raksasa saja, maka akan mengakibatkan perusahaan kecil menjadi sangat sulit dan hal pemasaran, bisa saja perusahaan kecil tersebut mengalami kebangkrutan dan tidak lagi mampu menggaji pekerjanya. Setelah perusahaan tersebut tidak mampu beroperasi lagi, maka para pekerja yang semula bekerja dalam perusahaan tersebut menjadi tidak mempunyai pekerjaan lagi. Kemudian akhirnya pekerja tersebut menjadi pengangguran.

2.1.7 Grease Theory dan Sand Theory

2.1.7.1. Grease Theory

2.1.7.1.1. Pengertian Grease Theory

Grease the Wheels Hypothesis atau *Grease Theory* merupakan sebuah hipotesis mengenai bagaimana korupsi dapat memberikan pengaruh yang

menguntungkan pada sebuah negara ketika aspek lembaga pemerintahnya tidak bekerja efektif.

Grease Theory sendiri sebenarnya sudah ada sejak lama, namun baru muncul kembali setelah Gazdar Kaouthar dalam penelitiannya tahun 2011 menemukan bahwa *Grease Theory* terjadi dan dapat ditemukan buktinya pada negara MENA. Sebelumnya beberapa ahli pernah mengeluarkan argumen yang nantinya merujuk pada *Grease the Wheels Hypothesis*, disimpulkan dari argumen Leys (1965), Huntington (1968) dan Leff (1964) bahwa korupsi dapat memberikan keuntungan dengan menghilangkan distorsi yang diakibatkan oleh lembaga yang tidak berjalan baik, dan dikatakan bahwa korupsi dapat menjadi pelumas (*grease*) untuk mempersingkat proses terjadinya kegiatan ekonomi, dengan kata lain *Grease Theory* berlaku sebagai mesin untuk menghindari masalah birokratis yang nantinya dapat meningkatkan efisiensi dari investasi dan juga pertumbuhan ekonomi (Meon dan Sekkat, 2005). Beck dan Maher (1986) dan Lien (1986) juga berargumentasi bahwa korupsi dapat meningkatkan efisiensi.

2.1.7.1.2. Faktor yang mempengaruhi *Grease Theory*

Grease Theory sendiri merupakan konsep pemikiran yang menghubungkan korupsi bersama kualitas lembaga pemerintah sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, jadi faktor yang membentuk hipotesis ini adalah korupsi, kualitas lembaga pemerintah dan pertumbuhan ekonomi yang berkaitan satu sama lain, tanpa adanya salah satu dari faktor

tersebut maka *Grease Theory* tidak akan dapat dibuktikan dan juga dapat dikatakan tidak terbukti (Gazdar Kaouthar, 2011).

2.1.7.2. *Sand Theory*

2.1.7.2.1. Pengertian *Sand Theory*

Sand the Wheels Hypothesis atau *Sand Theory* adalah kebalikan dari *Grease Theory*. Yakni bahwa korupsi dapat menurunkan tingkat pertumbuhan. Hipotesis ini sudah menjadi anggapan umum yang mengerucut pada suatu pengertian bahwa korupsi dianggap merugikan, hal tersebut didasari dari beberapa peneliti yang telah membuktikan dampak korupsi secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Mauro (1995) menemukan bukti empiris bahwa korupsi menurunkan pertumbuhan ekonomi dengan cara mengurangi investasi sektor swasta, Mo (2001) menemukan bahwa 1% kenaikan tingkat korupsi dapat mengurangi tingkat pertumbuhan sebesar 0,72% dan juga Tanzi (1998) mengatakan bahwa korupsi mengurangi efisiensi dan pertumbuhan melalui distorsi pada pasar dan alokasi sumber dayanya yang tidak merata. Berdasarkan berbagai penelitian yang mendukung *Sand Theory* maka dapat dikatakan *Sand Theory* menjadi paham konvensional terhadap perilaku korupsi, yaitu korupsi secara umum dianggap merugikan.

2.1.7.2.2. Faktor yang mempengaruhi *Sand Theory*

Sand Theory pada intinya melihat hubungan dari korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini tidak hanya langsung terhadap faktor pertumbuhan ekonomi namun juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh pada penelitian yang dilakukan oleh

Mauro (1998) menemukan bahwa korupsi memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mempengaruhi investasi swasta.

2.1.7.3. Grease Theory vs Sand Theory

Pembahasan mengenai *Grease Theory vs Sand Theory* sering menjadi masalah yang menarik untuk dikaji. Meon dan Sekkat (2005) pernah melakukan penelitian yang membahas hal tersebut. Dalam penelitian yang berjudul “*Does corruption grease or sand the wheels of growth?*”, Meon dan Sekkat mengukur hubungan antara dampak dari korupsi terhadap pertumbuhan dan investasi dan kualitas pemerintah di 71 negara pada tahun 1970 dan 1998, Meon dan Sekkat menemukan dampak negatif dari korupsi terhadap pertumbuhan secara independen terpisah dari dampaknya terhadap investasi. Dampak yang berpengaruh tersebut dapat berbeda bergantung dari kualitas pemerintahnya, dampaknya terlihat memburuk apabila indikator dari kualitas pemerintahnya ikut memburuk. Hal ini mendukung *Sand Theory* dan bertentangan terhadap *Grease Theory* yang menyatakan korupsi dapat berpengaruh baik pada kondisi pemerintahan yang buruk.

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi, korupsi, kualitas pemerintah, penerimaan pajak, dan investasi asing di berbagai negara telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, antara lain :

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Kaouthar Gazdar (2011) yang berjudul “*Does corruption “grease the wheels” of growth? Empirical evidence from MENA Countries* “. Bertujuan untuk membuktikan “*Grease the wheels*” hypothesis.

Penelitian ini mengamati hubungan antara kualitas lembaga pemerintah dengan tingkat korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di 19 negara MENA. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa korupsi tidak memberikan berpengaruh buruk pada pertumbuhan ekonomi apabila kualitas lembaga pemerintahnya lemah, dan pada kenyataannya korupsi malah berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila kualitas lembaga pemerintahnya sangat rendah. Dapat disimpulkan pada penelitian ini ditemukan bukti yang nyata dari “*grease the wheels*” hypothesis.

- b. Penelitian yang dilakukan Pak Hung Mo (2001) yang berjudul “*Corruption and Economic Growth*”. Penelitian ini memperkenalkan perspektif baru dari peran korupsi pada pertumbuhan ekonomi dan memberikan perkiraan kuantitatif dari dampak korupsi terhadap pertumbuhan juga untuk mengetahui seberapa penting dari variabel yang dapat berpengaruh dalam prosesnya. Penelitian ini menemukan 1% kenaikan tingkat korupsi dapat menurunkan tingkat pertumbuhan sekitar 0,72%. Penemuan lainnya dari penelitian ini yaitu bahwa kestabilan politik menjadi variabel terpenting dalam korupsi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang mana memberikan sebesar 53% dari pengaruh secara keseluruhan. Ditemukan juga bahwa korupsi mengurangi jumlah tenaga kerja dan investasi sektor swasta.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Boris Podobnik dkk (2008) yang berjudul “*Influence of corruption on economic growth rate and foreign investments*”. Hasil empiris dari penelitian ini mendukung efek negatif dari korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Bertujuan untuk menyelidiki apakah

peraturan pemerintah (undang-undang) terhadap korupsi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi disuatu negara, penelitian ini menganalisa keterkaitan antara *Gross Domestic Product* (GDP) perkapita dengan perubahan pada *Corruption Perception Index* (CPI) dari tahun ke tahun. Menggunakan sampel semua negara yang ada di dunia dengan jangka waktu dari tahun 1999-2004, penelitian ini menemukan bahwa peningkatan satu unit CPI dapat meningkatkan GDP perkapita sebesar 1,7%. Hasil yang berbeda ditunjukkan untuk negara-negara Eropa yang mengalami transisi, ditemukan satu unit CPI dapat meningkatkan GDP perkapita sebesar 2,4%. Disamping menganalisis hubungan GDP perkapita dengan CPI, penelitian ini juga menganalisa investasi asing yang diterima dengan CPI dan ditemukan hubungan yang signifikan secara statistik dari fungsi lembaga hukum diantara investasi asing dan tingkat korupsi yang diukur dengan CPI. Penelitian ini juga mengenalkan ukuran baru untuk mengukur hubungan korupsi diantara negara-negara didasarkan dari kekayaannya yang diukur dari GDP perkapita.

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Gareth D. Myles (2000) yang berjudul "*Taxation and Economic Growth*" meninjau kembali bukti teori dan empiris untuk mengetahui bagaimana pajak dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi lalu diambil kesimpulannya. Pada penelitian ini terlihat model teoritis memisahkan beberapa bagian melalui bagaimana pajak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan efeknya dapat menjadi substansial. Meskipun uji empiris menghadapi beberapa masalah yang tidak

dapat dipecahkan, bukti empiris berkesimpulan kuat bahwa efek dari pajak sangat lemah terhadap pertumbuhan ekonomi.

- e. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Jesus Osorio Amezaga (2013) yang berjudul "*Unemployment and Economic Growth in Peru : 2001-2012*". Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung koefisien Okun's untuk mengukur dampak dari pertumbuhan ekonomi pada tingkat pengangguran di Peru. Penelitian yang membandingkan hasil yang didapat dari Lima dan Peru ini menghasilkan kesimpulan terdapatnya hubungan negatif antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di kedua negara tersebut. Meskipun terdapat temuan ini, tingkat pengangguran masih sangat tinggi meski telah terlewati selama 12 tahun. Penelitian ini juga menemukan bahwa hubungan timbal-balik yang terjadi antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi berubah-ubah dari suatu daerah ke daerah lainnya dan tidak proporsional kepada jumlah populasi di setiap daerah.
- f. Penelitian yang dilakukan oleh E. Borenztein dkk (1998) yang berjudul "*How does foreign direct investment affect economic growth?*". Penelitian ini menguji efek dari Penanaman modal / Investasi Asing terhadap pertumbuhan ekonomi dengan kerangka regresi *cross-country*. Menggunakan data arus PMA dari negara industri menuju 69 negara berkembang selama kurun waktu dua decade. Hasilnya menunjukkan bahwa PMA merupakan kendaraan yang penting dari perpindahan teknologi, hubungannya lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ketimbang investasi lokal. Akan tetapi, produktivitas yang tinggi dari PMA baru akan terjadi ketika suatu negara memiliki

ketersediaan tenaga kerja yang cukup. Jadi kesimpulannya , PMA memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi hanya ketika kemampuan yang dibutuhkan untuk menyerap teknologi maju dimiliki oleh negara tersebut.

2.3. Kerangka Teoritis

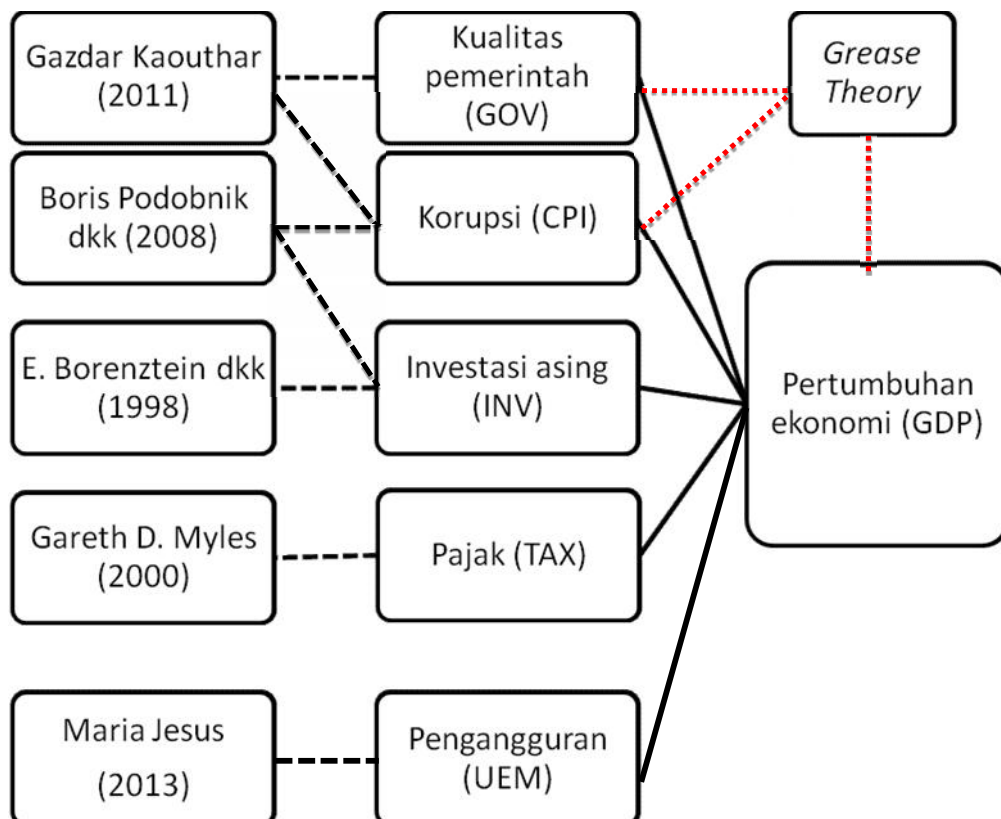
Masalah yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda diantara negara G-20. Dan dengan melihat tingkat korupsi dan kualitas pemerintah dari tiap negara tersebut, apabila memberikan pengaruh terhadap tingkat pertumbuhannya maka “*grease theory*” dapat dipahami dan dibuktikan kebenarannya. Faktor-faktor yang memiliki keterkaitan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi menurut penulis adalah tingkat korupsi, kualitas pemerintah, penerimaan pajak, investasi asing dan tingkat pengangguran.

Penulis berusaha menganalisis secara empiris dengan menggabungkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gazdar Kaouther (2011), Boris Podobnik dkk (2008), Gareth D. Myles (2000), dan E. Borenztein dkk (1998). Penelitian Gazdar Kaouther mendasari pemilihan variabel korupsi dan kualitas lembaga pemerintah sebagai variabel penyebab pertumbuhan, sekaligus menjadi dasar oleh penulis untuk melakukan pembuktian terhadap “*grease theory*”. Penelitian Gareth D. Myles sebagai dasar pemilihan variabel pajak, penelitian yang dilakukan oleh Borenztein dkk dan Boris Podobnik dkk menjadi dasar

pemilihan variabel investasi, dan penelitian yang dilakukan oleh Maria Jesus menjadi dasar pemilihan variabel pengangguran.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis



Keterangan :

----- : sumber pemilihan variabel

———— : faktor penyebab

..... : hipotesis

2.4. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara/kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya harus diuji secara empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian di bidang ini, maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) diduga berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (GDP). Jika nilai CPI mendekati 10 maka menunjukkan kondisi suatu negara yang semakin bersih dari korupsi. Semakin bersih dan rendah tingkat korupsi suatu negara maka semakin sedikit dana negara yang bocor sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat.
2. Kualitas Lembaga Pemerintah (GOV) diduga berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (GDP). Jika nilai GOV mendekati 100 maka menunjukkan kondisi suatu negara yang memiliki lembaga pemerintahan yang semakin baik dan berkualitas. Semakin baik dan berkualitas lembaga birokrasi dalam negeri dari suatu negara maka roda perekonomian dapat

berjalan dengan lancar tanpa hambatan dari birokrasi yang berbelit-belit sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

3. Penerimaan Pajak (TAX) diduga berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (GDP). Jika rasio penerimaan pajak terhadap GDP semakin tinggi menunjukkan jumlah pajak yang diterima negara semakin besar . Semakin besar jumlah pendapatan negara yang berasal dari pajak maka dapat menjadi dana negara dan alokasi ke anggaran semakin besar. Dengan alokasi anggaran yang besar pemerintah negara tersebut dapat menjalankan kegiatan ekonominya dengan baik dan meningkatkan pertumbuhannya.
4. Tingkat Pengangguran (UEM) diduga berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (GDP). Jika rasio jumlah tenaga kerja produktif menganggur terhadap jumlah keseluruhan tenaga kerja semakin tinggi menunjukkan jumlah pengangguran pada negara tersebut tinggi. Semakin besar jumlah pengangguran dalam suatu negara dapat menimbulkan beban bagi negara. Negara tetap harus memenuhi kebutuhan penduduknya secara makro sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut negara butuh kontribusi dari penduduknya dengan melakukan kegiatan ekonomi dan menghasilkan output. Dan apabila jumlah tenaga kerja yang menganggur lebih besar daripada tenaga kerja yang terserap oleh lapangan kerja dan melakukan kegiatan produksi dapat mengakibatkan terhambat dan lambannya perputaran roda ekonomi. Sehingga pada akhirnya dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi.

5. Jumlah Investasi Asing (INV) diduga berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (GDP). Jika rasio investasi asing terhadap GDP semakin tinggi menunjukkan jumlah investasi yang masuk dari luar negeri semakin tinggi. Semakin besar jumlah investasi yang masuk kedalam negeri secara tidak langsung dapat meningkatkan modal negara untuk melakukan kegiatan perekonomian dan pertumbuhannya dapat meningkat dengan signifikan.
6. Hipotesis terakhir adalah apabila Indeks Persepsi Korupsi (CPI) dan Kualitas Lembaga Pemerintah (GOV) terbukti memberi pengaruh yang positif dan signifikan maka berarti kedua variabel tersebut secara bersama-sama telah memberikan pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (GDP). Dalam hal ini berarti *Grease Theory* dapat dibuktikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Batasan Masalah

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah menganalisa pengaruh korupsi, kualitas lembaga pemerintah, pajak, dan investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara-negara G-20 pada tahun 2001 sampai 2010. Penelitian ini mengambil sampel negara-negara yang tergabung dalam G-20. Namun terdapat beberapa Negara yang tidak memiliki data baik karena tidak dilakukan penghitungan ataupun dipublikasikan oleh negara yang bersangkutan. Karena terdapat keterbatasan tersebut maka jumlah negara yang diteliti hanya berjumlah 21 negara dari keseluruhan negara yang tergabung dalam G-20. Negara-negara tersebut yaitu Australia, Kanada, Chechnya, Jerman, Denmark, Spanyol, Finlandia, Prancis, Inggris, Yunani, Kroasia, Indonesia, India, Italia, Korea selatan, Belanda, Polandia, Portugal, Slovenia, Swedia, Amerika.

Penelitian ini juga dilakukan untuk membandingkan perbedaan perilaku pengaruh korupsi, kualitas lembaga pemerintah, penerimaan pajak, investasi asing dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi yang terjadi dari tahun 2001 sampai tahun 2010. Adanya keterbatasan data juga yang mendasari pemilihan tahun 2001 sampai tahun 2010 sebagai sampel penelitian.

3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.2.1. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2004) variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Sedangkan menurut Hatch dan Farhady (dalam Sugiyono, 2004) mendefinisikan secara teoritis bahwa variabel sebagai atribut seseorang, atau objek, yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Berdasarkan telaah pustaka dan perumusan hipotesis, maka peneliti menetapkan variabel dalam penelitian ini antara lain:

1. Variabel Bebas atau Independen

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat atau dependen (Sugiyono, 2004). Dalam penelitian ini, Korupsi, Kualitas Lembaga Pemerintah, Pajak, Investasi asing, dan Tingkat Pengangguran ditetapkan peneliti sebagai variabel bebas atau independen.

2. Variabel Terikat atau Dependen

Variabel Terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2004). Dalam penelitian ini peneliti menetapkan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel terikat atau dependen.

3.2.2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian digunakan untuk memahami lebih mendalam tentang variabel pada penelitian ini, maka lebih mudah dituangkan dalam indikator-indikator sehingga variabel tersebut bisa diukur. Dalam penelitian ini terdapat beberapa definisi variabel antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi suatu negara digambarkan dengan pertumbuhan GDP dari tahun ke tahun nya. Data yang digunakan adalah sumber data yang berasal dari *World Bank*.

Dengan rumus penghitungannya yaitu :

$$GDP \text{ growth (annual \%)} = \frac{GDP_0 - GDP_1}{GDP_0} \times 100\%$$

Dimana :

GDP_0 = GDP tahun sebelumnya

GDP_1 = GDP saat ini

Untuk berikutnya variabel pertumbuhan ekonomi akan disebut dengan GDP.

2. Tingkat korupsi pada suatu negara digambarkan dengan skor CPI yang diberikan oleh *Transparency International (TI)* setiap tahunnya. Skor yang diberikan oleh TI merupakan gabungan dari 13 lembaga independen yang mengukur dengan metode yang berbeda-beda dan diolah oleh TI dengan metode dan tahapan yang berbeda pula setiap tahunnya. Sebagai contoh pada tahun 2010 TI menggunakan tiga tahapan dalam melakukan pengolahan data yang di dapat dari ke 13 lembaga itu. Tiga tahapan tersebut yaitu :

- Langkah pertama yaitu menstandarisasi data yang didapat dari setiap lembaga independen, menggunakan cara yang disebut dengan *matching percentiles technique* untuk memberikan ranking pada setiap negara yang dilaporkan pada data individual dari setiap lembaga. Metode ini berguna untuk menggabungkan sumber data yang berasal dari cara pengambilan yang berbeda. Meskipun terdapat informasi yang hilang karena cara ini, akan tetapi semua skor yang diperoleh dari sumber dapat dimasukkan dalam ruang lingkup CPI. Dan didistribusikan dari 0 sampai 10.
- Langkah kedua dilakukan cara yang disebut dengan *beta-transformation* dari skor yang telah terstandarisasi. Cara ini dapat meningkatkan standar deviasi dari semua negara yang tercatat dalam CPI dan menjadikannya dapat dibedakan dengan lebih akurat apabila terdapat negara dengan skor yang sama.
- Dan pada akhirnya skor CPI ditentukan dengan merata-rata nilai yang terstandarisasi dari setiap negara.

Untuk berikutnya variabel korupsi akan disebut dengan CPI

3. Kualitas lembaga pemerintah digambarkan dengan WGI yang merupakan kumpulan indikator dibidang pemerintahan dan dibagi menjadi enam dimensi. Penyusunan WGI dilakukan melalui pengolahan atas ratusan variabel individual yang didasarkan dari berbagai sumber data. Data-data ini merupakan persepsi dari berbagai kalangan, seperti pemerintah, swasta dan NGO, dalam memandang governance. Update atas Laporan WGI diterbitkan

2 (dua) tahun sekali sejak 1996 – 2002 dan tahun berikutnya dilakukan setiap tahun.

Metode yang dipergunakan dalam penghitungan dijelaskan sebagaimana berikut:

- a. Metode yang digunakan adalah pendekatan statistik. Prosedur statistikal yang digunakan untuk mendapatkan hasil perhitungan *aggregate* tiap indeks adalah *unobserved components model*, dimana tahapan yang dilakukan adalah:
 1. Me-rescale tiap individual data yang ada agar dapat digunakan satu skala yang *comparable*
 2. Pembobotan masing-masing *re-scaled* data dengan cara perhitungan statistik dimana data yang mempunyai korelasi paling tinggi terhadap *dependent variable* maka akan diberi bobot yang lebih tinggi dibandingkan data dengan korelasi rendah
 3. Dan dihitung *weighted average* nya, dimana *weighted average* adalah:
(bobot x rata-rata nilai re-scaled data)
- b. Yang perlu menjadi perhatian khusus dalam perhitungan indeks ini adalah dalam metode pembobotan, karena beberapa variable tertentu mempunyai korelasi yang tinggi sehingga penurunan atau kenaikan bobot akan berpengaruh signifikan terhadap *aggregate* indeks.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan keseluruhan dimensi WGI sebagai data untuk menentukan kualitas lembaga pemerintah. Hal tersebut dikarenakan antara dimensi satu dengan yang lainnya merupakan satu

kesatuan dan memiliki keterkaitan yang erat untuk dapat menggambarkan kualitas lembaga pemerintah suatu negara dari segala sisi dan menyeluruh. Apabila terdapat salah satu dimensi yang tidak digunakan maka dapat dikatakan WGI kehilangan salah satu indikatornya dan akan berkurang kemampuannya untuk dapat menggambarkan kualitas lembaga pemerintah. Maka dalam penelitian ini WGI diukur dengan menggunakan rumus :

$$WGI = \frac{VA + PS + GE + RQ + RoL + CoC}{6}$$

Dimana :

WGI = Ranking *World Governance Indicators* secara keseluruhan

VA = Ranking dari index *Voice and Accountability*

PS = Ranking dari index *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism*

GE = Ranking dari index *Government Effectiveness*

RQ = Ranking dari index *Regulatory Quality*

RoL = Ranking dari index *Rule of Law*

CoC = Ranking dari index *Control of Corruption*

Untuk berikutnya variabel kualitas lembaga pemerintah akan disebut dengan GOV

4. Penerimaan pajak menunjukkan pendapatan pemerintah yang berasal dari rakyatnya, dijadikan sebagai kas negara dan dapat digunakan untuk pembangunan negara. Data yang digunakan adalah sumber data yang berasal dari *World Bank*. Penerimaan pajak dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\textit{Tax Revenue}}{\textit{GDP}} \times 100\%$$

Dimana :

Tax Revenue = Penerimaan pajak

GDP = Jumlah GDP

Untuk berikutnya variabel penerimaan pajak akan disebut dengan TAX

5. Investasi Asing menggambarkan arus modal yang masuk dari luar negara kedalam suatu negara. Investasi asing tidak hanya membawa aliran modal masuk dari luar negeri yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara, tetapi investasi asing juga membawa masuk teknologi maju dalam prosesnya, yang mana teknologi itu sendiri mempunyai peran penting dalam mempengaruhi produktivitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan adalah sumber data yang telah dikumpulkan oleh *World Bank*. Tingkat investasi asing dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus :

$$FDI = \frac{\textit{net inflows}}{\textit{GDP}} \times 100\%$$

Dimana :

$FDI = \text{Foreign direct investment} / \text{tingkat investasi asing}$

$Net\ inflows = \text{jumlah modal yang masuk}$

$GDP = \text{jumlah GDP}$

Untuk berikutnya variabel investasi asing akan disebut dengan INV

6. Jumlah pengangguran menggambarkan jumlah dari tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan pekerjaan yang ada di negara tersebut. Masing-masing badan statistik tiap negara memiliki cara mengukur tingkat pengangguran yang tidak sama. Data yang digunakan adalah sumber data yang berasal dari *World Bank*. Tingkat pengangguran dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Total Unemployment}}{\text{Total Labor Force}} \times 100\%$$

Dimana :

$\text{Total Unemployment} = \text{Jumlah angkatan kerja yang menganggur.}$

$\text{Total Labor Force} = \text{Jumlah angkatan kerja secara keseluruhan.}$

Untuk berikutnya variabel tingkat pengangguran akan disebut dengan UEM

3.3. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder yang berupa data kuantitatif. Data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya yang dapat tersaji dalam bentuk tabel, grafik, dan lain

sebagainya yang berasal dari penelitian sebelumnya, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lain sebagainya.

Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang mempresentasikan suatu ukuran kuantitatif dari obyek yang diteliti dalam satuan ukuran tertentu.

3.4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dimana penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang mendukung melengkapi penulisan ini yang didapatkan dari membaca penelitian-penelitian terdahulu, berbagai literatur, jurnal dan buletin serta bahan bacaan lainnya yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang berasal dari berbagai penerbit yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Data sekunder ini dikumpulkan melalui metode pencatatan dengan cara mengoleksi dan mencatat berbagai data (dokumentasi) yang sudah tersedia di sumber-sumber data yang relevan dengan topik penelitian.

3.5. Sumber Data

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dari berbagai data (dokumentasi) yang berhubungan dengan hasil-hasil penelitian dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian seperti dari berbagai instansi atau lembaga pemerintah maupun lembaga non-kepemerintahan (NGO) yang terkait seperti *World Bank*, *Asian Development Bank*, *Transparency International*, *Central Intelligence Agency*, dan penelitian sebelumnya (jurnal terkait

3.6. Analisis Data

3.6.1. Alat Analisis

Metode analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effects Model (FEM)* atau *Least Square Dummy Variable (LSDV) Model*. *Terminologi fixed effect* menunjukkan bahwa meskipun intersep bervariasi sepanjang individu, setiap intersep tersebut tidak bervariasi sepanjang waktu, yang disebut *time invariant*. Dapat juga dinyatakan bahwa berdasarkan model FEM, diasumsikan bahwa koefisien *slope* dari regresor tidak bervariasi antar individu maupun antar waktu (Firmansyah, 2009).

Bentuk model *fixed effect* adalah dengan memasukkan variabel *dummy* untuk menyatakan perbedaan intersep baik lintas individu maupun waktu. Pemilihan *dummy* harus didasarkan pada pertimbangan yang tepat sehingga mampu melihat perbedaan yang terjadi diantara negara-negara G-20. *Dummy* yang dipilih adalah *dummy* sesuai dengan jumlah negara yang dijadikan sampel penelitian. Dalam penelitian ini ada 21 Negara, maka hanya perlu 20 variabel *dummy* untuk mengetahui perbedaan intersep antara 21 negara tersebut.

Adapun bentuk persamaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 GDP_{it} = & \beta_0 + \beta_1 CPI_{1it} + \beta_2 GOV_{2it} + \beta_3 TAX_{3it} + \beta_4 INV_{4it} + \beta_5 UEM_{5it} \\
 & + \beta_6 D_{1i} + \beta_7 D_{2i} + \beta_8 D_{3i} + \beta_9 D_{4i} + \beta_{10} D_{5i} + \beta_{11} D_{6i} + \\
 & \beta_{12} D_{7i} + \beta_{13} D_{8i} + \beta_{14} D_{9i} + \beta_{15} D_{10i} + \beta_{16} D_{11i} + \beta_{17} D_{12i} + \beta_{18} D_{13i} + \\
 & \beta_{19} D_{14i} + \beta_{20} D_{15i} \\
 & + \beta_{21} D_{16i} + \beta_{22} D_{17i} + \beta_{23} D_{18i} + \beta_{24} D_{19i} + \beta_{25} D_{20i} + e_{it}
 \end{aligned}$$

Dimana :

β_0 : Intersep untuk negara 1

β_1 s.d β_5 : Koefisien regresi

β_6 s.d β_{25} : Intersep pembeda yang menjelaskan seberapa besar perbedaan intersep negara 2,3,4,,,21 dengan intersep negara 1

GDP : Tingkat pertumbuhan ekonomi

CPI : Indeks persepsi korupsi

GOV : Kualitas lembaga pemerintah

TAX : Tingkat penerimaan pajak

INV : Jumlah investasi asing

UEM : Tingkat pengangguran

D : Variabel *dummy*

i : Jumlah Negara

t : Tahun 2001-2010

3.6.2. Pengujian Statistik (*First Order Test*)

3.6.2.1. Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (*goodness of fit test*). Nilai koefisien determinasi di antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$), nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memperoleh prediksi variasi model dependen (Gujarati, 2008).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* R^2 pada saat mengevaluasi model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai *adjusted* R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

3.6.2.2. Koefisien Regresi Secara Individual (Uji t)

Uji t dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya adalah konstan. Nilai t hitung dirumuskan dengan :

$$T \text{ hitung} = \frac{\text{koefisien regresi}}{\text{standar deviasi}}$$

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut : H_0 ditolak apabila t hitung $>$ t tabel, yang berarti variabel independennya mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

3.6.2.3. Koefisien Regresi Secara Serentak (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel-variabel dependen. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan.

Hipotesis yang digunakan adalah:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

H_1 : minimal ada satu koefisien regresi tidak sama dengan nol (Gujarati, 2008).

Nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2 / K - 1}{(1 - R^2) / (N - K)}$$

Dimana:

K = jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

N = jumlah observasi

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :

1. H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, yang artinya variabel penjelas secara serempak atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.
2. H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, yang artinya variabel penjelas secara serentak dan bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

3.6.3. Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik (*Second Order Test*)

3.6.3.1. Deteksi Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah suatu gejala dimana terdapat korelasi antar variabel independen (Nachrowi dan Ustman, dalam Prabawati 2009). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka variabel ini tidak ortogonal yang artinya variabel independen memiliki nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol.

Untuk mendeteksi apakah terjadi multikolinearitas atau tidak di dalam model, dapat dilihat apakah *R-Squared* yang dihasilkan oleh estimasi tinggi, akan tetapi secara individu variabel independen banyak yang tidak signifikan (Gujarati, 2008).

Dalam penelitian ini, cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model adalah regresi parsial atau metode *Klein's Rule of Thumb*. Dimana perlu dilakukan *auxiliary regression* antar

variabel independen, kemudian membandingkan nilai *R-Squared* (regresi parsial) dengan *RSquared* regresi utama. Jika nilai *R-Squared* regresi parsial lebih tinggi dari nilai *RSquared* regresi utama, maka dikatakan terdapat multikolinearitas.

3.6.3.2. Deteksi Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan yang lain (Gujarati, 2008). Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibat adanya heteroskedastisitas, penaksir OLS tidak bias tetapi tidak efisien (Gujarati, 2008). Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan *white heteroscedasticity-consistent standard errors and covariance* yang tersedia dalam program Eviews. Uji ini diterapkan pada hasil regresi dengan menggunakan prosedur *equations* dan metode OLS untuk masing-masing perilaku dalam persamaan simultan. Hasil yang perlu diperhatikan dari uji ini adalah nilai *F* dan *Obs*Rsquared*, secara khusus adalah nilai *probability* dari *Obs*Rsquared*. Dengan uji *White*, dibandingkan *Obs*Rsquared* dengan 2 (*Chi-Square*) tabel. Jika nilai *Obs*Rsquared* lebih kecil daripada tabel maka tidak ada heteroskedastisitas pada model (Gujarati, 2008).

3.6.3.3. Deteksi Autokorelasi

Autokorelasi (serial korelasi) adalah korelasi yang terjadi di antara anggota observasi yang berdekatan. Bila asumsi ini tidak dipenuhi maka estimator OLS

tidak lagi efisien. Karena selang keyakinan akan semakin lebar, berarti uji t dan uji F menjadi tidak valid dan kurang kuat.

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data *time series*) atau ruang (seperti dalam data *cross section*). Autokorelasi pada umumnya lebih sering terjadi pada data *time series* walaupun dapat juga terjadi pada data *cross section*. Dalam data *time series*, observasi diurutkan menurut urutan waktu secara kronologis. Maka dari itu besar kemungkinan akan terjadi interkorelasi antara observasi yang berurutan, khususnya kalau interval antar dua observasi sangat pendek.

Salah satu uji formal yang paling populer untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji *Durbin-Watson*. Uji ini sesungguhnya dilandasi oleh model error yang mempunyai korelasi sebagaimana ditunjukkan, yaitu :

$$\mu_t = \rho\mu_{t-1} + v_t$$

dimana:

μ_t : error pada waktu ke- t

μ_{t-1} : error pada waktu ke- $(t-1)$

ρ : koefisien autokorelasi lag-1 (untuk mengukur korelasi antara residual pada waktu ke- t dengan residual pada waktu $(t-1)$)

v_t : error yang independent dan berdistribusi normal dengan nilai tengah = 0, dan varians σ^2 .

Jika $\rho = 0$, maka dapat disimpulkan tidak ada serial korelasi di dalam residual.

Oleh karena itu, uji ini menggunakan hipotesis sebagai berikut :

$$H_0 : \rho = 0$$

$$H_1 : \rho \neq 0$$

Statistik *Durbin-Watson* didefinisikan sebagai berikut :

$$DW = \frac{\sum_{t=2}^n (\mu_t - \mu_{(t-1)})^2}{\sum_{t=2}^n \mu_t^2}$$

Dimana :

$$\mu_t = Y_t - \beta_0 - \beta_1 X_t = Y_t - Y_t$$

Yaitu residual pada waktu ke-t

$$\mu_{t-1} = Y_{t-1} - \beta_0 - \beta_1 X_{t-1} = Y_{t-1} - Y_{t-1}$$

Yaitu residual pada waktu ke (t-1).

Persamaan (3.4) dapat pula dituliskan sebagai berikut :

$$DW = 2 \left[\frac{1 - \sum \mu_t \mu_{(t-1)}}{\sum \mu_t^2} \right] = 2 (1 - \rho)$$

Persamaan (3.5) dapat pula dituliskan sebagai berikut :

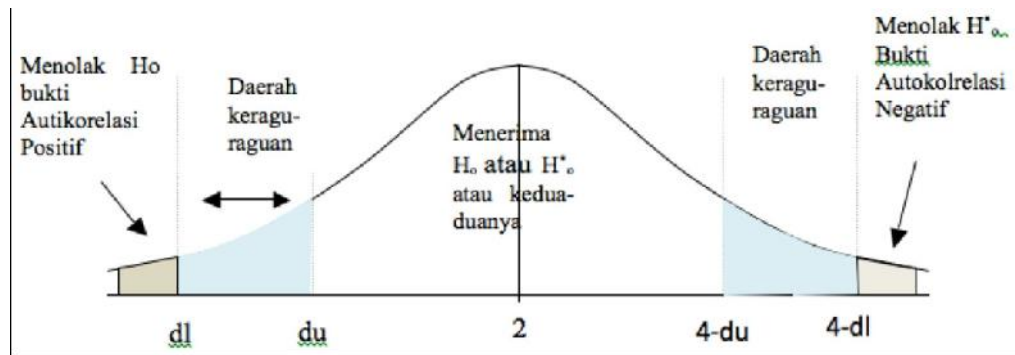
$$\rho = \frac{\sum (\mu_t - \mu_{(t-1)})^2}{\sum \mu_t^2}$$

Sebagaimana telah disebutkan bahwa ρ adalah koefisien autokorelasi yang mempunyai nilai : -1 $\leq \rho \leq$ 1. Dengan demikian, berdasarkan persamaan (3.4) akan dapat nilai statistik DW, yaitu : $0 \leq DW \leq$ 1. Persamaan (3.4) juga mengartikan bahwa :

- Jika statistik DW bernilai 2, maka ρ akan bernilai 0, yang berarti tidak ada autokorelasi
- Jika statistik DW bernilai 0, maka ρ akan bernilai 1, yang berarti tidak ada autokorelasi positif.
- Jika statistik DW bernilai 4, maka ρ akan bernilai -1, yang berarti tidak ada autokorelasi negatif.

Untuk kepentingan tersebut, DW telah mempunyai tabel yang digunakan sebagai pembanding uji DW yang dilakukan, sehingga dapat di simpulkan dengan tepat ada atau tidaknya autokorelasi. Dalam membandingkan hasil tersendiri. Untuk mempermudah dalam memahami cara melakukan perbandingan tersebut, perhatikan gambar berikut :

Gambar 3.1

Durbin-Watson

Selain itu, untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam model, juga dapat digunakan Uji *Breusch-Godfrey*. Jika nilai $Obs \cdot R\text{-squared}$ yang merupakan 2 hitung memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai 2 tabel mengindikasikan bahwa dalam model tidak terdapat autokorelasi.